

**PENGESAMPINGAN ASHABAH MA'AL GHAIR
PADA PUTUSAN NOMOR 2661/PDT.G/2018/PA.SMG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Oleh:
Luluk Dyah Pitaloka Oktaviani
NIM.1502016103

**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Luluk Dyah Pitaloka Oktaviani
NIM : 1502016103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2661/PDT.G/2018/PA.SMG
TENTANG TIDAK BERLAKUNYA ASHABAH MAAL
GHAIR"

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 11 Juli 2019

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman M.H.,
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II


Muhammad Shioim S.Ag M.Ag
NIP. 19711101 200604 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Luluk Dyah Pitaloka Oktaviani
NIM : 1502016103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : "Pengesampingan Ashabah Ma'al Ghair pada Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode, pada tanggal: 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 29 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Supangat, M.Ag.
NIP. 19840402200501 1 004
Penguji I

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002
Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H
NIP. 19650605199203 1 003

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag.MH.
NIP. 19711101 200604 1 003
Penguji II

Afif Noor, S.Ag. S.H., M.Hum.
NIP. 19760615200501 1 005
Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag.MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

MOTTO

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولي رجل ذكر¹

Artinya: "Nabi saw bersabda: berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Setelah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari dan Muslim)²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. (QS. al-Nisa': 11)"³

¹ Shahih muslim, *Kitabul faraidh*, (Fikr 41392, 1993), h. 1

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 4, h. 76

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984-1985), h. 117

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Syukur hamba ucapkan Kepada-Mu Ya Allah atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan kecerdasan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, maka karya ini peneliti persembahkan untuk mereka yang selalu mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

Kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Arif Sudiharso dan Ibunda tersayang Su'atini yang mendo'akan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku serta memberikan motivasi, baik dukungan spiritual maupun material yang tiada hentinya. Saudara-saudaraku, Arga Gede Surya Harya Mataram, Andreas Yoga Jati Kusuma, Aprissa Sekar BTB, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Kepada Sahabat-sahabatku, Maulida Nailul Izzah, Oviestha Ersya RD, Astri Fadhlila, dan Irvan Setya Kurniawan yang sampai saat ini memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.

Kepada Teman sekaligus sahabat senasib dan seperjuangan "HKC-15" Feli, Auly, Thoifur, Yanda, Resti, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan gambaran mengenai kebersamaan kita selama ini. Kepada Teman-teman HKI angkatan 2015.

Kepada Sahabat-sahabat KKN Ke-VII Posko 87 yang telah memberikan dukungan. Kepada Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Terima kasih dukungan kalian semua, aku mampu menyelesaikan perjuanganku menuju gelar sarjana hukum. Semoga amal perbuatan kalian dicatat sebagai amal yang memenuhi timbangan di akhirat dan mendapat ridho-Nya. Amin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Dyah Pitaloka Oktaviani

NIM : 1502016103

Jurusan : Hukum keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Juli 2019

Deklarator,



Luluk Dyah Pitaloka O.
1502016103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Vokal Pendek

—َ—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—ِ—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—ُ—	dammah	ditulis	<i>u</i>

III. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ ـَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ	kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

IV. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الطلاق	ditulis	<i>At-Thalaq</i>
الشيرازي	ditulis	<i>Asy-Syirazi</i>

V. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, mazhab, syariat.
 - Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
 - Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

ABSTRAK

Waris erat kaitanya dengan pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pada 2018 ditemukan kasus yang tertuang pada Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg, pada putusan ini terdapat gugatan waris antara seorang anak kandung (penggugat) dengan ayah tirinya (tergugat) yang juga saudara perempuan dalam hal ini yang dalam putusnya mengesampingkan saudara perempuan sebagai *ashabah ma'al ghair* sesuai padahal sesuai hadist Shahih Bukhari, pendapat jumhur ulama' dan teori Prof. DR. Ahmad Rofiq M.A. Bahwa ukhtun syaqiqah tersebut apabila bersama anak perempuan, menurut semua kitab faraid bagian warisnya adalah *ashabah ma'al ghair*. Oleh karenanya penulis ingin meneliti lebih lanjut dasar hukum yang seharusnya berlaku dalam putusan ini.

Adapun Rumusan Masalah yang di kaji dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara tentang waris pada Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/Pa.Smg? 2). Bagaimana analisis menurut Hukum Waris Islam terhadap pengesampingan Ashabah maal ghair pada Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg ?

Data yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan bahan sumber primer yaitu putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/Pa.Smg. Adapun Sumber Data sekunder, meliputi buku-buku, tulisan yang terkait dengan analisis peneliti, jurnal hukum, hasil wawancara dan data pendukung lainnya.

Berdasarkan Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Pada putusan No.2661/Pdt.G/2018/PA.Smg, Majelis hakim menolak gugatan dari penggugat dikarenakan gugatan tidak sesuai dengan petitum, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku pada pasal 176 dan pendapat Ibnu Abbas yang memaknai "*Walad*" sebagai laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini Ibnu Abbas ini diuraikan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir dan Rekan-rekannya meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa: "Jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang adik perempuan, maka adik perempuan tidak mendapatkan bagian" Menurut majelis hakim bahwa pertimbangan tersebut untuk pembaruan hukum Islam dengan mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan gender dimana keadilan itu harus diletakkan pada tempat/hak yang seharusnya. Karena keadilan itu tidak melihat perbedaan jenis kelamin, namun dengan mempertimbangkan kronologi perkara dengan menggunakan interogasi filosofi. 2). Hukum waris Islam yang berlaku pada Putusan Pengadilan Agama ini adalah dikesampingkannya *ashabah maal ghair* sebagaimana hadist-hadist shahih bukhori yang ada dan sudah dipraktekkan dari zaman Rasulullah Saw, pada putusan tersebut tidak menggambarkan majelis hakim mempertimbangkan hadist yang ada, padahal dengan begitu majelis hakim melenceng dari qathiiyyuddilalah maka bertentangan dengan syari'at islam.

Kata Kunci: *Ashabah ma'al ghair, anak bersama saudara perempuan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, Amiin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya amin.

Skripsi dengan judul “Pengesampingan Ashabah Ma'al Ghair Pada Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/Pa.Smg” tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Banyak orang berada disekitar penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dorongan yang berharga kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dan berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, antara lain kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Drs H. Eman Sulaeman M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH, selaku pembimbing II, Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku kepala Prodi dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag., selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam. Terima kasih banyak atas arahan, nasehat, bimbingan, motivasi, dan saran-sarannya sehingga skripsi ini selesai, Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Sembah sujud penulis haturkan kepada orang tua tercinta, ayahanda Arif Sudiharso dan Ibu Su'atini yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, tiada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan penyemanagat moral dan spiritual dalam hidupku, tidak mudah berputus asa dan selalu hidup dalam kesederhanaan.

Bapak Prof. Dr Ahmad Rofiq M.Ayang telah rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan riset selama di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Keluarga Besar GenBI (Generasi Baru Indonesia) semoga

tetap totalitas, loyal, Solid, dan selalu menjaga kekeluargaan walau sudah tidak satu organisasi. Untuk sahabat-sahabatku Irvan, Maulida, Erska, Kak Astri, kalian semua adalah keluarga bagiku terima kasih untuk suport yang telah kalian berikan. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal sholeh dan mendapatkan imbalan yang stimpal dari Allah Swt Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis. untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Wallahua'alam bi al-shawab

Semarang, 29 Juli 2019

Penulis,

Luluk Dyah Pitaloka O

1502016103

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Waris sangat erat kaitanya dengan harta peninggalan atas kematian seseorang yang meninggalkan harta. Harta peninggalan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya masing masing tanpa adanya konflik yang selama ini banyak dipermasalahkan.

Waris merupakan salah satu kajian ilmu fiqih yang sangat penting. Adapun kata mawaris merupakan jama' dari kata "*mirats*" yang berarti pusaka atau disebut juga harta peninggalan.⁴ Dengan demikian semua harta peninggalan orang yang telah wafat yang diterima oleh para ahli waris disebut dengan *mirats*. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan benda dinamakan *muwaris*, sedangkan orang yang berhak menerima harta benda disebut waris atau ahli waris. Istilah harta atau terkadang disebut *tirkah*, dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 7, maka dapatlah dimengerti bahwa harta peninggalan mempunyai arti yang sama dengan *mirats* yakni harta peninggalan, jadi harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dinamakan *tarikah* si mati atau *tarikatul mayyit*.

Beberapa pengertian tentang ilmu mawaris yang telah disebutkan fuqoha, antara lain definisi yang ditulis oleh Hasbi Ash- Shiddiqi dalam bukunya Fiqh al-mawaris, bahwa ilmu mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, dan kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Adapun maksud dari uraian tersebut bahwa ilmu waris itu memaparkan tentang kriteria ahli waris, yang menyebabkan seorang tersebut menjadi ahli waris, persyaratan yang harus dipenuhi agar mereka memperoleh harta waris. Disamping itu juga

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Ed. II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1068.

memaparkan tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat disekitar pembagian warisan itu⁵

Permasalahan harta waris selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Alquran seperti (QS. An-Naml: 16 dan An-Nisa : 7-12)⁶

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pada masa jahiliyah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.⁷ Dengan demikian anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Maka kematian seorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga disebabkan perebutan harta warisan.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak pembagian harta waris dianggap kurang adil dan tidak sesuai dengan syariat islam, di tahun 2018 ditemui kasus di Pengadilan Agama Semarang yang dimungkinkan menjadi konflik oleh beberapa pakar hukum islam beserta pihak yang bersengketa kaitanya pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, seperti Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg, pada putusan ini terdapat gugatan waris antara seorang anak kandung dengan ayah tirinya yang dalam hal ini terdapat juga saudara kandung

⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawarist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 4.

⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media, 2013), h. 32.

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 4, h. 6.

dari sang mayit yang dalam putusnya Majelis Hakim menggunakan pendapat Mahkamah Agung No. 86 K/AG/194 untuk mendasari pertimbangan hukumnya yaitu “Selama masih ada “anak”, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup”; dalam hal ini Majelis Hakim menerangkan bahwa pendapat diatas sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir yang mu’tabar di kalangan sahabat Nabi Saw yang menafsirkan kata “’walad” pada ayat 176 Surat an-Nisa yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki laki maupun anak perempuan; tafsir Ibnu Katsir, pandangan Ibnu Abbas ini diuraikan oleh Ibnu Jarir dan Rekan-rekannya meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa : “Jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang adik perempuan, maka adik perempuan tidak mendapatkan bagian” (tafsir Ibnu Katsir Juz II, halaman 442 dalam Maktabah Syamilah) ⁸

Terdapat pula pandangan lain yang mengatakan bahwa saudara perempuan sekandung (ukhtun syaqiqah) kedudukannya sama sekali tidak mahjub (terhalang) oleh anak perempuan. Yang benar adalah jika ukhtun syaqiqah tersebut bersama anak perempuan, menurut semua kitab faraid bagian warisnya adalah *ashabah ma’al ghair*. ⁹

Ashabah ma’al ghair adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris tersebut tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (al-furudl al-muqaddarah). Yang berhak menerima bagian ashabah ma’al ghair tersebut antara lain adalah saudara sekandung (seorang atau lebih) bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Dan saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). ¹⁰

⁸Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg.

⁹Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al. Ma’arif, 1981), h. 299.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Opcit.*, h. 75.

Adapun dasar hukum pembagian *Ashabah ma'al ghair* ini adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud :

عن أبي مسعود رضي الله عنه فربنت ابن واخت قض النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنه الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت¹¹

“Nabi Muhammad Saw memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan” (Riwayat al-Jama'ah selain Muslim dan Nasa'i)¹²

إن معاذ ابن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن والنبي ص م يومئذ
حي¹³

“Mu'az ibn Jabal memberikan warisan kepada saudara perempuan dan anak perempuan masing-masing setengah, ketika berada di Yaman, sedang Nabi Saw waktu itu masih hidup” (Riwayat Abu Dawud dan Al-Bukhari dari al-Aswad)¹⁴

Hadist yang kedua diatas menjelaskan bahwa bagian saudara perempuan adalah setengah. Bagian setengah tersebut adalah bagian sisa setelah diambil untuk diberikan kepada anak perempuan. Meskipun dalam keadaan bersama sama dengan ahli waris selain anak atau cucu perempuan maka saudara perempuan menerima bagian 1/2 , tetapi yang dimaksud adalah bagian sisa (*'ashabah ma'a al ghair*) ini dapat diperjelas lagi, bahwa anak perempuan lebih dari seseorang (dua atau lebih) maka bagian saudara perempuan tidak 1/2 tetapi 1/3, setelah bagian 2/3 diberikan kepada anak perempuan.

Dari dua pendapat tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis Hukum Islam yang seharusnya berlaku serta bagaimana aspek keadilan yang ingin direalisasikan hakim melalui Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg karena

¹¹ Al-Bukhariy, Shahih al Bukhariy, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah), h. 7

¹² Ahmad Rofiq, *Opcit.*, h. 76

¹³ Al-Bukhariy., *Opcit.* h. 6

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Opcit.*, h. 76

penulis berpendapat bahwa sumber hukum islam yang paling utama adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan yurisprudensi harus mengacu pada sumber dan dokumen asli untuk menemukan tindakan yang benar. Sehingga penulis berkeinginan dan meneliti serta menelaah lebih dalam dengan mengangkat judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2661/PDT.G/2018/PA.SMG TENTANG TIDAK BERLAKUNYA ASHABAH MAAL GHAIR”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara tentang waris pada Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/Pa.Smg?
2. Bagaimana analisis menurut Hukum Waris Islam terhadap pengesampingan ashabah ma'al ghair dalam Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara waris pada Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg tentang dikesampingkannya *Ashabah Ma'al Ghair* yaitu ahli waris anak perempuan bersama sama dengan saudara perempuan.
2. Untuk menganalisa Pemikiran Hakim tentang Hukum Waris Islam terhadap pengesampingan ashabah maal ghair pada Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg.

Manfaat Penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang waris khususnya pemikiran Hakim mengenai sistem pembagian waris dengan dikesampingkannya *ashabah maal ghair*. Serta bisa dijadikan bahan

perbandingan penelitian yang berkenaan dengan putusan yang berkaitan dengan *Ashabah*.

2. Manfaat secara aplikatif.

Sebagai kontribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan waris.

D. TELAHAH PUSTAKA

Aktivitas studi kepustakaan merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian itu sendiri, *six in library saves six months in field or laboratory*. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka penelitian akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹⁵

Berdasarkan fungsi keputustaannya mengkaji atau telaah pustaka (*literaturereview*) sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berupa sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul di atas. Seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya. Aspek telaah pustaka dengan sumber acuan khusus artinya menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.¹⁶

Skripsi karya Nuh Latif (072111020), jurusan Al-Akhwāl Al Syakhsyah, fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2014 yang berjudul

¹⁵Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2010), h. 93.

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ke-11, h. 66.

” Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/Ag/1995 Tentang Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Bersama Saudara Pewaris” dalam skripsi ini hanya menganalisa Alasan putusan MA No. 184 K/Ag/1995 saja, meskipun berkaitan namun berbeda objek yang akan dianalisa.

Selanjutnya terdapat pula skripsi Khoirun Nisa’, yang berjudul “Pemikiran Hazairin Mengenai penghapusan Ashabah Dalam Sistem Kewarisan Bilateral”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016, skripsi ini membahas pemikiran antara sunni dan hazzahirin dimana menurut hazahirin Ashabah dihapuskan dalam ahli waris, pemikiran hazahirin yang membagi tiga bagian ahli waris yaitu: yang pertama dzu al-faraidl istilah ini juga dipakai oleh Syafi’i maupun Hazairin, yang kedua adalah dzu al-qarabat, dalam hal ini Hazairin menolak konsep ashabah sebagaimana diterapkan Syafi’i, ketiga adalah mawali, adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang lebih dahulu meninggal. Dalam skripsi ini penulis fokus pada dihapusnya ashabah menurut pemikiran Hazahirin saja.

Terdapat pula jurnal yang berjudul ‘Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan’ Vol. IV/No. 5/Mei/2016 Oleh: Ishak Kasim, bahwa dalam jurnal ini membahas tentang kedudukan anak, juga membahas Ashabah menurut Hukum Islam, bahwa Ashabah dalam jurnal ini mengakui bahwa bagian ashabah bersama yang lain yaitu bersama anak perempuan zatau cucu perempuan dari laki-laki atau keduanya sekaligus, satu atau lebih, maka mengambil sisanya setelah mereka itu. Misalnya anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seapak. Meskipun terdapat bahasan seperti yang penulis teliti, namun dalam jurnal ini fokus terhadap kedudukan anak saja.

Selain diatas ada skripsi yang berjudul ‘Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris’ oleh Mikail Hafiz, Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018. Dalam skripsi kali ini membahas hak ahli waris anak dan saudara pewaris menurut hukum

kewarisan islam, dalam skripsi ini membahas putusan Pengadilan Agama Trenggalek No. 0092/Pdt.P/2012/PA.TL, sengketa waris ini di putuskan bahwa saudara kandung pewaris mendapat bagian harta dari pewari sebagai ashabah bersama anak perempuan. Hal ini tentu berbeda analisis yang akan penulis telaah.

Terakhir adalah skripsi yang berjudul, ‘Analisis Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad Dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Saudara Bersama Anak Dalam Proses Legislasi Nasional’, Umi Sakinah Nim: 102111063, ilmu syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2014, dalam skripsi ini pembahasan terfokus pada pendapat Ibnu Abbas mengenai makna ‘walad’ dan implikasinya agar mendapatkan legalisasi nasional. Dalam analisis ini tidak membandingkan pendapat Ibnu Abbas dengan hadist kaitanya dengan keshahihan atau sumber hukum yang lebih tinggi untuk dijadikan dasar legalisasi nasional dan juga tidak menggunakan sumber data putusan.

Dari beberapa penelitian di atas menerangkan mengenai putusan putusan pengadilan tentang hak waris seorang saudara yang bersamaan dengan anak yang mana saudara, ada yang mengatakan termahjub dan juga tidak mahjub. Dan dari skripsi dan jurnal di atas judul dan apa yang dianalisis berbeda mengingat penulis mengkaji Putusan Pengadilan Agama Semarang.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

2. Sumber Data

- a) Sumber data primer merupakan sumber data utama, dalam penelitian ini data utama yang digunakan penulis yaitu:

1. Putusan Pengadilan Agama Semarang Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg.
 2. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- b) Sumber data sekunder Buku referensi yang mendukung atau berkaitan dengan yang penulis kaji, yaitu buku-buku yang masih berkaitan erat dengan permasalahan waris, misalnya Ilmu Waris karya Fatchur Rahman, Fiqih Mawaris karya Ahmad Rofiq, Hukum Kewarisan Islam karya Prof. Dr. Amir Syarifudin, serta kitab-kitab fiqh klasik. Dari sumber data sekunder ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi dari sumber data primer tersebut.

1. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data menggunakan Studi kepustakaan (documentary study) yakni melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian

2. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Untuk itu, untuk menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian, penulis menggunakan analisis content analisis yaitu dengan menganalisis literatur-literatur yang bersifat khusus, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menjaga alur pembahasan dan mempermudah pembahasan maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan rasionalisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik kenapa penulis tertarik dengan penelitian ini, rumusan masalah untuk dapat terlaksananya penelitian ini secara fokus, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan pentingnya melakukan penelitian ini, telaah pustaka untuk menjelaskan dimana posisi penulis serta perbedaan yang dimunculkan, metode penelitian untuk menjelaskan cara dan langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini.

Bab II Memuat tinjauan umum tentang waris dan istimbath hukum yang berhubungan dengan teks al-Qur'an. Materi waris meliputi: pengertian dan dasar hukum waris, syarat, rukun, dan penghalang waris, ahli waris dan bagiannya, hijab dan mahjub. Dan materi tentang istimbath hukum yang berhubungan dengan teks al-Qur'an meliputi: lafaz ditinjau dari segi kandungan pengertiannya, lafaz ditinjau dari segi penggunaannya, lafaz ditinjau dari segi jelas artinya, lafaz dari segi dilalahnya atas hukum. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk dapat mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Bab III Membahas Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg tentang tidak berlakunya Ashabah Ma'al Ghair. Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari dan memahami pemikiran Hakim dan dasar yang dipakai memutuskan putusan tersebut.

Bab IV Menyajikan analisa tentang Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg tentang tidak berlakunya Ashabah Ma'al Ghair, serta keefektifan putusan tersebut

Bab V, Berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang ada serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN DASAR HUKUM WARIS

A. Pengertian Waris dan Hukum Waris

Waris berasal dari kata *al-mirath*, bentuk jamaknya *al mawarith* dan *al-warith*, jamaknya *al-warathah*, berasal dari akar kata *waritha-yarithu-wirthan*

*wa warthan wa irthan wairathatan wa turathan wa mirathan*¹⁷ menurut bahasa artinya : berpindahnya harta seorang yang meninggal kepada oranglain.

Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang)dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan, dan kedudukan.¹⁸

Dalam beberapa literatur hukum islam kata waris juga sering disebut *faraidh* jamak dari lafazh *faridhah* yaitu bagian yang telah dipastikan kadarnya.

Definisi waris secara *lughawi* tidak terbatas pada hal hal yang berkaitan seputar harta peninggalan, akan tetapi mencakup harta benda dan harta non benda.¹⁹ Kata waris berasal dari kata *waratsa* (ورث) adalah kata waris pertama yang digunakan dalam Al-Quran. Kata waris dalam berbagai bentuk arti tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran yang antara lain dalam Surat Az-Zumar yang terdapat pada ayat 74, waris mengandung maknamemberi atau menganugerahkan, pada Surat An-Naml ayat 16 waris adalah mengganti kedudukan, kemudian dapat ditemukan dalam Surat Al-Maryam ayat 6 waris mengandung arti mewarisi atau menerima harta warisan.²⁰

Pengertian waris menurut Soepomo adalah hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur, meneruskan serta memindahkan barang-barang harta yang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedern*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) pada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua tersebut masih hidup. Meninggalnya kedua orang tua adalah suatu peristiwa yang penting bagi

¹⁷ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 1.

¹⁸ *Ibid.*, h. 1.

¹⁹ Muhammad AliAsh-Shabuni, *Al-MawarisFisySyari"atil Islamiyah AlaDhau"Al-Kitab wa Sunnah. Terjemahan A.M. Basalam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), h. 33.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.

proses dalam waris, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan perpindahan harta benda dan harta non benda.²¹

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris* memberikan definisi mengenai fiqh mawaris yaitu ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.²²

Adapun pengertian hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).

Selain itu adalah ilmu *faraid* yang banyak didefinisikan para ahli faraid tentang ilmu *faraid* atau fiqh mawaris. Walaupun secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad ash-Sharbiny mendefinisikan Ilmu *faraid* adalah, ilmu fikih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).²³

Sedang Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan, Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapat warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.²⁴

Adanya istilah lain yang berhubungan dengan kata waris, antara lain:²⁵

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8

²²Ahmad Rofiq, *Opcit.*, h. 3.

²³Muhammad ash-Sharbini al-Khatib, *Mughini al-Muhtar*, Juz III (Kairo: Musthafa al-Ba'bil Halby, 1958), h. 3.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 6.

²⁵Ahmad Rofiq, *Opcit.*, h. 4.

- a. Waris, adalah orang yang menjadi ahli waris yang berhak menerima harta waris.
- b. Muwaris, adalah orang yang mewariskan harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara *haqiqi* maupun secara hukum karena adanya penetapan dari pengadilan.
- c. Al-Irts, adalah harta waris yang dibagikan untuk ahli waris yang berhak diambil setelah pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- d. Wartsah, yaitu harta benda yang diterima ahli waris berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- e. Tirkah, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil guna pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, serta menunaikan wasiat.

B. Dalil Waris

Dasar dan sumber utama waris yang terdapat dalam hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al- Quran dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang menjeaskan mengenai waris yaitu

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat yang mengatur tentang waris di antaranya adalah terdapat dalam surat an-Nisa (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat al-Anfal (8) ayat 72 dan 75, serta surat al-Ahzab (33) ayat 6. An-Nisa ayat 11 berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. (QS. al-Nisa’: 11)”²⁶

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984-1985), h. 117

An-Nisa :176

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Jika mereka beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan...(QS. al-Nisa’: 176)”²⁷

Ayat di atas mengandung beberapa garis hukum, antara lain :²⁸

- a. Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak- anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan
 - b. Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga
 - c. Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat seperdua bagian
 - d. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si *mayyit*.
2. Sunnah Nabi

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولي رجل ذكر²⁹

Artinya:”Nabi saw bersabda:berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Setelah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim³⁰)

²⁷ Depag RI, *Opcit.*, h. 153

²⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 13.

²⁹ Shahih muslim, *Kitabul faraidh*, (Fikr 41392, 1993), h. 1

³⁰ Ahmad Rofiq., *Opcit.*, h. 75

C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara kepemilikannya, kadar harta yang diterima dan waktu terjadinya. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

1. Asas Ijbari

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.³¹ Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak si *mayyit* atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.³²

2. Asas Bilateral

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas bilateral dengan maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176³³

3. Asas Individual

Asas kewarisan secara individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 19.

³²*Ibid.*, h. 20.

³³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 208.

bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Dan berhak pula menuntut harta warisan secara sendiri sendiri atau tidak berbuat demikian.³⁴ Seperti telah diterangkan dalam ayat-ayat kewarisan surat An Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 yang menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Memang dalam beberapa bentuk terlihat secara berkelompok atau bersama, seperti dua anak perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam ayat 11 dan dua saudara perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam ayat 176. Namun bentuk kolektif ini hanya sementara yaitu sebelum terjadi pembagian secara individual.³⁵

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata (العدل) dalam hubungannya menyangkut kewarisan diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³⁶

Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil dan orang dewasa tidak adil. Karena kebutuhan orang dewasa lebih banyak daripada anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama daripada orang dewasa. Inilah keadilan yang hakiki dalam pandangan Islam, keadilan berimbang bukan keadilan merata.³⁷

5. Asas Semata Karena Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta

³⁴Amir Syarifuddin, *Ibid.*, h. 23.

³⁵*Ibid.*, h. 24

³⁶*Ibid.*, h. 26

³⁷*Ibid.*, h. 30.

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup dan berarti pula bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung atau setelah ia mati tidak termasuk dalam kewarisan menurut hukum Islam.³⁸

D. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

1. Rukun :

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi tiga rukun, yaitu

- a. Ahli waris, yaitu orang yang berhak akan harta waris karena ada sebab-sebab seperti kekerabatan secara nasab, perkawinan, dan lain-lain.³⁹
- b. Pewaris, yaitu si mayat secara jelas atau hukum. Misalnya orang hilang (*mafqud*) yang telah diputuskan kematiannya.⁴⁰
- c. Barang yang diwaris. Disebut juga *tirkah* atau warisan. Yaitu harta atau hak yang berpindah tangan dari orang yang memberi waris kepada ahli waris.⁴¹

2. Syarat

Sebagaimana rukun pewarisan, syarat pewarisan juga ada tiga, yaitu :

- a. Meninggalnya *muwarrith* dengan sebenarnya maupun secara hukum⁴²
Menurut ulama, kematian *muwarrith* dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu:

1. Mati *haqiqi* (sejati)

³⁸*Ibid.*, h.30.

³⁹M. Ash Shabuni, *al Mawarith fi ash-sharat al-Islamiyyah*, (Kairo: Bibliotecha Alexandria, t.t), h. 39.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Daral-Fath, 1995), h. 346.

⁴¹*Ibid.*, h. 346.

⁴²*Ibid.*, h. 347.

Mati haqiqi adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.⁴³

2. Mati *hukmi* (menurut putusan hakim)

Mati *hukmi* adalah kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.⁴⁴

3. Mati *taqdiri* (menurut dugaan)

Mati *taqdiri* adalah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmi*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan pada dugaan yang kuat⁴⁵

b. Hidupnya Ahli Waris

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi harta apabila dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah *mafqud*, anak dalam kandungan dan mati berbarengan.⁴⁶

Masalah *mafqud* terjadi apabila keberadaan ahli waris tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati ketika *muwarrith* meninggal dunia. Maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqud* tersebut masih hidup. Hal itu dilakukan untuk menjaga hak si *mafqud* apabila ternyata dia masih hidup, apabila dalam tenggang waktu dia tidak datang sehingga ia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing.⁴⁷

Tidak adanya suatu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan yaitu karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

⁴³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994), h. 79.

⁴⁴*Ibid.*, h. 79.

⁴⁵*Ibid.*, h. 80

⁴⁶Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 5.

⁴⁷*Ibid.*, h. 5.

E. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan Dalam Islam

1. Sebab sebab kewarisan dalam islam

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat dapat diklasifikasikan sebagai berikut

a. Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan darah yang mengikat antara ahli waris dengan *muwarrith*.⁴⁸ Yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.⁴⁹

b. Perkawinan

Yaitu terjadinya akad nikah secara *shar'i* antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun perkawinan yang *batil* atau rusak tidak dapat menjadi sebab mendapatkan waris.⁵⁰ Yang termasuk klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si mayat⁵¹

c. Wala'

Wala' adalah kekerabatan secara hukum. Yakni ikatan yang mengikat antara orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan.⁵²

d. Sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya

⁴⁸Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 30.

⁴⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 53.

⁵⁰Ali as-Sabuni, *Opcit.*, h. 39

⁵¹Suhrawardi K. Lubis, *Opcit.*, h. 53.

⁵²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Opcit.*, h. 31.

diserahkan kepada Baitul Mal, dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin⁵³

2. Penghalang Kewarisan dalam Islam

Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi kesepakatan para *fuqaha*, sedangkan berlainan negara masih diperselisihkan.⁵⁴

Sedangkan menurut KHI Pasal 173 mengatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat parapewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁵

F. Ahli Waris dan Jumlah Bagianya

1. Kelompok Ahli Waris

Kelompok ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, mereka adalah :

- a) Ahli waris laki-laki ada lima belas:⁵⁶
 1. Anak laki laki
 2. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya kebawah

⁵³Suhrawardi K. Lubis, *Opcit.*, h. 53.

⁵⁴Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 32.

⁵⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), h. 55.

⁵⁶Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Opcit.*, h. 63-64.

3. Bapak
4. Kakek dan seterusnya keatas
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Sudara laki-laki seibu
8. Keponakan laki-laki sekandung
9. Keponakan laki-laki sebapak
10. Pamansekandung
11. Paman sebapak
12. Sepupu laki-laki sekandung
13. Sepupu laki-laki sebapak
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakan budak

b) Ahli waris perempuan ada sepuluh :

1. Anakperempuan
2. Cucuperempuan
3. Ibu
4. Nenek dari jalur bapak dan seterusnya ke atas
5. Nenek dari jalur ibu dan seterusnya keatas
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan sebapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakan budak

Selain itu ada ahli waris utama yang di dalam hukum waris islam, keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk menerima waris. ahli waris utama terdiri dari enam pihak, mereka adalah janda, duda, ibu, anak perempuan, bapak dan anak laki- laki.⁵⁷

⁵⁷Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Opcit.*, h.53

2. Golongan Ahli Waris dan Bagianya

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian fardl tertentu, mereka disebut ahli waris asbab al furudl atau dhawil furudl. Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris asbab al furudl, mereka disebut ahli waris ashabah. Golongan ahli waris yang ketiga adalah keluarga dekat yang disebut dengan dhawil arkham. Golongan ketiga ini masih diperselisihkan hak warisnya. Dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagiannya faradl atau ashabah.:

a. Asbab al furudl

Kata *furud* (فروض) merupakan jamak dari kata *al-fard* (الفرض). Para ulama Fara'id memberikan definisi dengan redaksi berbeda, namun mempunyai maksud yang sama.

Hasbi ash-Siddieqy, mengemukakan bahwa *fard* adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan baik dengan nash ataupun dengan ijma'.⁵⁸

Bagian tertentu atau furudl al-muqaddarah dalam al-Qur'an hanya ada enam macam:

1. Setengah (1/ 2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

- a) Suami, apabila ia tidak mewarisi bersama far'alwarith (anak turun si *mayyit* yang dapat mewarisi dengan jalan: al usubah, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah;
- b) *fardl*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki sampai kebawah.
- c) Anak perempuan, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki.
- d) Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia seorang diri dan

⁵⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Opcit.*, h. 59.

tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki serta anak laki-laki dan anak perempuan.

- e) Saudara perempuan sekandung, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki kandung, bapak dan *far' al-warith*.
- f) Saudara perempuan seapak, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki seapak, *far' al-warith* serta saudara laki-laki atau perempuan kandung.

2. Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada dua, yaitu:

- a) Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan *far' al-warith* atau tidak bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun perempuan baik sekandung, seapak atau seibu.
- b) Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, apabila tidak bersama-sama dengan *far' al-warith* atau *asadh-dhakar* (leluhur si mayyit yang berhak menerima waris) yaitu bapak dan kakek.

3. Seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:

- a) Suami, apabila mewarisi bersama *far' al-warith*.
- b) Istri atau para istri, apabila tidak mewarisi bersama *far' al-warith*.

4. Seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ada delapan orang, yaitu:

- a) Ayah, apabila mewarisi bersama *far' al-warith*.
- b) Ibu apabila mewarisi bersama *far' al-warith*, atau beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.
- c) Kakek, apabila mewarisi bersama *far' al-warith*, tetapi tidak mewarisi bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si mayyit.
- d) Nenek dari pihak bapak, apabila ia tidak mewarisi bersama

bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat.

- e) Nenek dari pihak ibu, apabila ia tidak mewaris bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat.
 - f) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih), apabila mewarisi bersama seorang saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung serta tidak bersama saudara laki-laki seapak.
 - g) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila seorang diri dan tidak bersama *far' al-warith* atau bapak dan kakek.
 - h) Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila mewaris bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki.
5. Seperdelapan (1/8) Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang, yaitu istri atau para istri, apabila mewarisi bersama dengan *far' al warits*.
6. Dua pertiga (2/3)
- Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ada empat, yaitu:
- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila mereka tidak bersama-sama dengan muashibnya (orang yang menyebabkannya menerima ashabah)
 - b) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau muashibnya
 - c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan muashibnya
 - d) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki seapak.⁵⁹

b. Dhawil-Arham

⁵⁹Ahmad Rofiq, *Opcit.*, h. 69.

Secara umum, Dhawil arham berarti orang yang memiliki hubungan kekerabat dengan orang yang meninggal.⁶⁰ Dhawil Arham adalah, setiap kerabat yang bukan asbab furud dan bukan golongan Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan, ashb ab al-furud dan ‘asabah⁶¹

G. Definisi Ashabah

Untuk memahami makna kata *ashabah* bisa dimulai dengan telaah atas ayat-ayat Al-Qur’an, sebab kata tersebut digunakan juga dalam beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya:

An Nur :11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ
مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”⁶²

Menurut penafsiran Ibnu Abbas, makna ‘usbah adalah jamaah dan jika dihubungkan dengan sebab nuzulnya, maka ‘usbah adalah nama yang masih kerabat Aisyah sendiri, yaitu: Ibnu Abi Salul, Hasan bin Sabit, Ibnu Usasah misan Abu Bakar (ayahanda Aisyah).⁶³

Sedangkan pengertian ‘ashabah menurut istilah para fuqaha’ ialah

⁶⁰M. Athoillah. *Opcit.*, h. 116

⁶¹ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Opcit.*, h. 53

⁶² Departemen Agama RI, *Opcit.*, h. 78

⁶³ Ahmad Kuzari, *Sistem Ashabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 76.

ahli waris yang tidak disebutkan berapa banyak bagiannya di dalam al-Qur'an dan sunnah dengan tegas. Pengertian *'ashabah* yang sangat masyhur di kalangan ulama fara'id adalah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *ashabal-furud* menerima dan mengambil bagian masing-masing.

H. Dalil Ahli Waris Ashabah

Dalil yang menyatakan bahwa para *'ashabah* berhak mendapatkan waris kita dapat di dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalil al-Qur'an yang dimaksud ialah:

1. Al Qur'an An Nisa : 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ

خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ

مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

*Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”*⁶⁴

Dalam ayat ini disebutkan bahwa bagian kedua orang tua (ibu dan bapak) masing-masing mendapatkan seperenam (1/6) apabila pewaris mempunyai keturunan. Tetapi bila pewaris tidak mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik kedua orang tua. Ayat tersebut juga telah

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Opcit.*, h. 117.

menegaskan bahwa bila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga (1/3). Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan berapa bagian ayah. Dari sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, dua pertiganya (2/3) menjadi hak ayah. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai 'ashabah.⁶⁵

2. AL-Qur'an An Nisa: 176

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ

Artinya “Jika mereka beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan...(QS. al-Nisa’: 176)”⁶⁶

Pada ayat ini tidak disebutkan bagian saudara kandung. Namun, yang disebutkan justru saudara kandung akan menguasai (mendapatkan bagian) seluruh harta peninggalan yang ada bila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan. Kemudian, makna kalimat, *wahuwa yarithuha* memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi haknya. Inilah makna 'ashabah.⁶⁷

3. Hadits Rasulullah

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر⁶⁸

Artinya: *Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.* (HR.Muslim)⁶⁹

I. Macam Ahli Waris Ashabah

⁶⁵Muhammad Ali as-Shabuni, *Opcit.*, h. 67

⁶⁶ Depag RI, *Opcit.*, h. 153

⁶⁷*Ibid.*, h. 67

⁶⁸ Shahih muslim, *Kitabul faraidh*, (Fikr 41392, 1993), h. 1

⁶⁹*Ibid.*, h. 67

Ashabah terbagi menjadi dua macam: ‘ashabah jalur nasab dan ‘ashabah jalur sebab.⁷⁰

1. Ashabah Jalur Sebab

‘*Ashabah* jalur sebab adalah tuan yang memerdekakan budak, baik itu lelaki atau perempuan. Jika tidak ditemukan orang yang membebaskannya, makawarisan diberikan kepada ahli waris ashabah tuan yang memerdekakannya⁷¹

Sebab orang yang memerdekakan adalah penyebab hidupnya orang yang dimerdekakan, sebagaimana ayah adalah sebab keberadaan anak. Dengan pertimbangan, bahwa kebebasan adalah kehidupan manusia, karena tetapnya sifat kepemilikan orang tersebut. Sedangkan perbudakan adalah kerusakan dan kebinasaan. Juga, sebagaimana anak dinisbatkan kepada ayahnya, demikian juga orang yang dimerdekakan dinisbatkan kepada orang yang memerdekakan dengan cara perwalian. Sebagaimana warisan adalah dengan nasab, maka dia juga bisa dengan *wala*’. Hal itu dalam batas-batas orang yang memerdekakan dan ‘*asabah*-nya. Shara’ menjadikan hubungan orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan sama hukumnya hubungan kerabat dengan kerabatnya. Maka, dia mewarisi seluruh harta jika sendiran, dan mengambil sisa harta itu setelah dibagikan kepada ashabah al-furud jika ada.⁷²

2. Ashabah Jalur Nasab

‘Ashabah jalur nasab itu ada tiga macam, yaitu ‘ashabah bi nafsih, ‘ashabah bi gairih, dan ‘ashabah ma’al ghair.

a. ‘Asabah bi nafsih

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Daral-Fath, 1995), h. 356.

⁷¹*Ibid.*, h. 358

⁷²Wahbah Az-Zuhayli, *Opcit.*, h. 333

Ialah tiap-tiap kerabat yang lelaki yang tidak diselingi dalam hubungannya dengan yang meninggal oleh seorang wanita. Mereka ada empat golongan: ⁷³

- 1) Arah anak, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya.
- 2) Arah bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya, yang pasti hanya dari pihak laki-laki, misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya.
- 3) Arah saudara laki-laki, mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki, anak laki-laki keturunan saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Arah ini hanya terbatas pada saudara kandung laki-laki dan yang seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk 'asabah disebabkan mereka termasuk ashab al-furud.
- 4) Arah paman, mencakup paman (saudara laki-laki ayah) kandung maupun yang seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya. Arah anak didahulukan daripada arah ayah. Arah ayah didahulukan daripada arah saudara-saudara laki-laki. Dan terakhir ini didahulukan daripada arah paman. ⁷⁴
- 5) Penyebab didahulukannya anak daripada ayah adalah karena cabang anak lebih kuat hubungannya daripada asal-usulnya, dan karena firman Allah dalam surat *al-Nisa* '(4): ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ

⁷³Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Opcit.*, h. 148.

⁷⁴Wahbah az-Zuhayli, *Opcit.*, h. 336

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Jika ditemukan beberapa banyak orang dari satu derajat maka yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah yang paling dekat kepada si mayat. Jika ditemukan beberapa banyak orang yang sama hubungan mereka sampai ke mayat baik dari sisi jalur maupun derajatnya maka yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah yang paling kuat kedekatannya. Jika si mayat meninggalkan beberapa orang yang sama dalam hubungan kepada mayat baik dari sisi jalur, derajat, dan kuatnya kedekatan, maka mereka bisa berhak sama sesuai jumlah kepala mereka.”⁷⁵

b. Ashabah bil Ghair

Adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqaddarah*). Ahli waris penerima ‘ashabah bil gair tersebut adalah :

1. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki.
2. Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian ‘ashabah, maka bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Seperti firman Allah pada surat *al-Nisa*’ (4): ayat:

An-Nisa176:

⁷⁵ Depag RI, *Opcit.*, h. 153

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷⁶

c. Ashabah Maal Ghair

Yaitu, setiap perempuan yang menjadi 'ashabah karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain. Dia hanya mempunyai dua keadaan :

- 1) Saudara perempuan sekandung, baik satu atau lebih, dengan seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Saudara perempuan seayah, seorang atau lebih. Demikian juga dengan seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki. Maka, sisa dari bagian seorang anak perempuan, beberapa anak perempuan, atau seorang anak

⁷⁶ Depag RI, *Ibid.*, h. 117

perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, untuk seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan dengan *'ashabah* bersama mereka.

Adapun dasar hukum pembagian *'ashabah ma'al ghair* ini adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud :⁷⁷

عن أبي مسعود رضي الله عنه فريقت ابن واخت قض النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنه

الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي ففلاح⁷⁸

Artinya: “Nabi Muhammad Saw memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Riwayat al-Jama'ah, selain Muslim dan al-Nasa'i)

إن معاذ ابن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن والنبي ص م يومئذ حي⁷⁹

Artinya: “Mu'adh ibn Jabal memberikan warisan kepada saudara perempuan dan anak perempuan masing-masing setengah, ketika berada di Yaman, sedang Nabi Saw waktu itu masih hidup.” (Riwayat Abu Dawud dan al-Bukhari dari al-Aswad dengan maknanya).⁸⁰

Hadis yang kedua di atas menjelaskan bahwa bagian saudara perempuan adalah setengah. Bagian setengah tersebut adalah bagian sisa setelah diambil untuk diberikan kepada anak perempuan. Meskipun dalam keadaan bersama-sama dengan ahli waris selain anak atau cucu perempuan, maka saudara perempuan menerima bagian 1/2, tetapi yang dimaksud adalah bagian sisa (*'ashabah ma'a gairih*). Ini dapat diperjelas lagi, bahwa misalnya anak perempuan lebih dari seorang (dua

⁷⁷Ahmad Rofiq, *Opcit*, h. 76.

⁷⁸ Shohih Bukhori, *juz 7*, (1426), h. 7

⁷⁹ *Ibid.*, h. 6

⁸⁰*Ibid.*, h. 76

orang atau lebih) maka bagian saudara perempuan tidak 1/2 tetapi 1/3, setelah bagian 2/3 diberikan kepada anak perempuan.⁸¹

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian warisan ini, maka ahli waris *'ashabah* yang peringkat kekerabatannya berada di bawahnya, tidak mendapatkan bagian.⁸²

Dari hasil wawancara penulis dengan Ahmad Rofiq Bahwa dasar dari Buku karangan Beliau yang berjudul “Fiqh Mawaris” berkaitan Ashabah Ma'al Ghair adalah Hadits riwayat Ibnu Mas'ud:

عن أبي مسعود رضي الله عنه فرئيت ابن واخت قض النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنه

الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي ففلاخ⁸³

Artinya: *Nabi Muhammad Saw memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan.* (Riwayat al-Jama'ah, selain Muslim dan al-Nasa'i)⁸⁴

Bahwa anak perempuan mendapatkan setengah, apabila ada saudara perempuan maka saudara perempuan mendapatkan *ashabah ma'al ghair*. hal ini berdasarkan surat An-Nisa': 176 bahwa makna *walad* diartikan sebagai anak “laki-laki” bukan sebagai “anak perempuan maupun laki laki”, hal ini di analogikan apabila diposisikan cakupan dengan laki laki maka saudara perempuan mahjub karena laki laki tidak ada yang menanggung kecuali orangtua, namun bila kata “*walad*” diposisikan sebagai anak perempuan maupun laki laki, anak perempuan merupakan tanggungan atau tanggung jawab dari laki laki, oleh karenanya makna *walad* menurut jumhur diartikan sebagai anak laki laki.

⁸¹ *Ibid.*, h. 77

⁸² *Ibid.*, h. 73

⁸³ Shohih Bukhori, *Opcit.*, h. 7

⁸⁴ Ahmad Rofiq., *Opcit.*, h. 76

Bila pewarisnya terdapat suami si *mayyit*, anak perempuan si *mayyit* dan saudara perempuan, berdasarkan hadist dan tafsir al-qur'an tersebut maka saudara perempuan mendapatkan bagian *ashabah ma'al ghair* dan bila saudara perempuan tersebut meninggal maka yang mendapatkan *ashabah* adalah anak dari saudara perempuan tersebut apabila ada anak dari saudara perempuan tersebut.

J. Pendapat Para Ulama' Tentang Kedudukan Anak Perempuan Bersama Saudara

Pemaknaan kata "*walad*" pada ayat An Nisa' : 176 di atas dalam konsep *kalalah* ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama menafsirkan kata "*walad*" itu ialah anak laki-laki saja, namun ada ulama lain yang menafsirkannya kata "*walad*" itu ialah tidak hanya anak laki-laki namun anak perempuan pula. Berikut penjelasan para ulama dalam menafsirkan pengertian *kalalah* di atas.⁸⁵

a. Menurut pendapat Abu Bakar ar. Dan Umar ra.

Diriwayatkan bahwa pada masa hidupnya Umar berharap ia dapat mengetahui tentang *kalalah*. Ath-Thabari menuliskan beberapa riwayat mengenai Umar semasa hidupnya senantiasa berharap kebenaran mengenai *kalalah*. Pada salah satu riwayat tersebut dituliskan bahwa Umar bin Khaththab berkata, "*Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang seringkali aku tanyakan daripada permasalahan kalalah, hingga beliau menusukkan jari beliau ke dadaku sambil bersabda, Cukup bagimu (dalam permasalahan itu), ayat shaif yang berada di akhir surah An-Nisa*".⁸⁶

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Aku termasuk orang yang terakhir hidup pada masa Umar RA, aku mendengar dia mengatakan seperti perkataanku. Perawi bertanya, „apa*

⁸⁵ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid. 8, h. 206.

⁸⁶ *Ibid.*

perkataanmu?” Dia menjawab, „Al-kalalah artinya orang yang tidak mempunyai anak”⁸⁷

Kemudian riwayat dari Asy-Sya“bi, ia berkata: *Abu Bakar RA berpendapat tentang kata al-kalalah. Ia berkata: “Aku mengatakan dengan pendapatku sendiri, maka jika benar itu datangnya dari Allah. Al kalalah artinya yang tidak ada ayah dan anak.”* Ketika Umar menjadi khalifah, ia berkata, *“Sungguh, aku akan malu kepada Allah untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar.”⁸⁸*

Pada saat ajal menjemputnya, Umar berkata tentang kalalah, *“Aku telah menulis sebuah kitab mengenai kedudukan kakek dan kalalah, dan aku telah meminta petunjuk mengenai hal tersebut. Kini sebaiknya aku tinggalkan permasalahan itu kepada kalian sebagaimana kalian memutuskan.”* Hal ini menurut riwayat dari Sa“id bin Al-Musayyab.⁸⁹

b. Menurut Jumhur Ulama Ahlusunnah

Jumhur ulama mengartikan kalalah adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka berpendapat bahwa makna *walad* disini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian, anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak memengaruhi arti kalalah⁹⁰

Pendapat jumhur ulama’ ini agaknya terpengaruh oleh dua hal. *Pertama*, penggunaan secara *urf* (adat/kebiasaan sehari-hari) dari kata *walad* itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat bahasa Arab kata “*walad*” itu diartikan anak laki-laki, bukan perempuan, meskipun dalam hakikat penggunaan bahasa dan begitu pula dalam penggunaan syar“i berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya, ulama ahlusunnah terpengaruh

⁸⁷ *Ibid.*, Jilid. 6, h. 565

⁸⁸ *Ibid.*, h. 559

⁸⁹ *Ibid.*, h. 207

⁹⁰ Amir Syarifuddin., *Opcit.*, h. 57

oleh adat jahiliyah dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata walad tidak menurut pengertian umum.⁹¹

Kedua, terpengaruh oleh Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ud tentang pembagian warisan untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Ibnu Mas‘ud berkata, “*Aku akan memutuskan sesuai yang diputuskan Rasulullah SAW: anak perempuan mendapat separoh, anak perempuan dari anak laki-laki mendapat sperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan*”.⁹² Pada hadis ini dijelaskan bahwa saudara perempuan dapat mewarisi bersama anak perempuan sebagai ashabah ma‘al ghairih. Hadis ini mengandung arti bahwa anak perempuan tidak menghibah saudara perempuan. Dalam keadaan begini tentunya pewaris bukanlah kalalah⁹³

Kemudian jumhur ulama pun memilah tentang saudara mana yang tidak tertutup oleh anak perempuan. Bagi mereka, anak laki-laki dapat menghibah saudara dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak dapat menghibah saudara sekandung dan seayah, tetapi dapat menghibah saudara seibu. Sulit mencari jawaban kenapa saudara seibu dapat dihibah oleh anak perempuan, sedangkan saudara sekandung dan seayah tidak dapat dihibah. Hanya ditemukan satu alasan yaitu saudara seibu dipertalikan kepada pewaris hanya melalui jalur perempuan atau ibu⁹⁴

⁹¹*Ibid.*, h. 58.

⁹² Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas‘ud: Studi Tentang Ibnu Mas‘ud dan Tafsirnya*, Penerjemah: Ali Murtadho Syahudi, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009), h. 385

⁹³ Amir Syariffudin, *Opcit.*, h. 162

⁹⁴ *Ibid.*, h. 58-59

c. Menurut Ibnu Abbas

Dalam kitab Ath-Thabari, terdapat beberapa riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas berkata bahwa Al-kalalah artinya orang yang tidak meninggalkan anak dan ayah.⁹⁵ Kemudian Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat waris ini untuk menghapuskan tradisi jahiliyah yaitu harta warisan hanya untuk anak laki-laki dan wasiat hanya untuk kedua orang tua dan kerabat. Turunnya ayat waris (Q.S: 4: 11) ini menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.⁹⁶

Kemudian mengenai makna *walad* dalam ayat 176 Surat An-Nisa, Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. berpendapat bahwa kata *walad* (anak) tersebut ialah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Alasannya adalah kata *walad* dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al-Quran bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga anak perempuan, seperti dalam ayat 11 Surat An-Nisaa, Allah berfirman dengan memakai kata *awlad* (kata jama" dari kata *walad*) yang artinya: "*Allah wajibkan kamu tentang "awlad" (anak-anak kamu), buat seorang anak laki-laki (adalah) seperti bagian dua anak perempuan...*". Kata *awlad* dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan anak perempuan tersebut, maka kata *walad* dalam ayat 176 surah An-Nisaa tersebut di atas, menurutnya juga mencakup anak laki-laki dan perempuan.⁹⁷

Maka dari itu, menurut Ibnu Abbas bahwa anak perempuan dapat menghibah kewarisan saudara perempuan. Beliau tidak menjadikan

⁹⁵ Ath-Thabari, *Opcit*, Jilid. 6, h. 561.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 536

⁹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. III, h. 303.

saudara-saudara perempuan sebagai ashabah bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud dan sekelompok ulama lainnya.⁹⁸

K. Kedudukan Saudara dalam KHI.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memerhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana telah pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin S.H, dan Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebelumnya mempunyai tipe fiqh Indonesia, yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru, tapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam Hukum Islam.⁹⁹

Usaha yang telah dilakukan Departemen Agama pada 1958 dengan membatasi hanya 13 buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Pengadilan Agama, adalah merupakan upaya ke arah pemberlakuan hukum Islam sebagai perundang-undangan negara yang dilakukan Negara India, Turki, dan Sudan. Dan oleh sebab itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama. Dibuatnya Kompilasi Hukum Islam ini sebagai satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.¹⁰⁰

Mengenai kewarisan, KHI secara umum mengambil doktrin fikih tradisional dan merujuk pada nash-nash Al-Quran yang cocok, misalnya memberikan anak laki-laki bagian waris yang sama besarnya dengan dua

⁹⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka, 2008), Jilid. 6, h. 68.

⁹⁹ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 12.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 11

anak perempuan dan mempertahankan aturan ashabah bahwa saudara laki-laki yang terdekat mendapat sisa. Namun, dipengaruhi adat dan norma-norma setempat, KHI menerapkan aturan-aturan lain, seperti sistem ahli waris pengganti dan wasiat wajibah yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih manapun.¹⁰¹

Pasal 181 dan 182 KHI menyatakan bahwa hak waris dari saudara kandung hanya bisa diberikan jika tidak ada anak. Kata anak ini adalah terjemahan sebenarnya dari walad. Jadi, KHI menetapkan menurut kata Al-Quran. Pada dasarnya, kata anak mengacu pada anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, tampaknya penggunaan kata ini masih membingungkan bagi sebagian hakim yang mempertanyakan apakah kata ini, seperti kata walad dalam al-Quran, mengacu hanya kepada laki-laki sebagaimana dalam penafsiran Sunni, atau kepada laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas.¹⁰²

Beberapa kalangan penyusun menjelaskan bahwa anak yang dimaksud adalah baik laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa kompilasi melakukan terobosan dan perubahan terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama klasik. Dikehendaki bahwa seorang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hijab-menghijab terutama ketika mereka berada bersama saudara. Penyetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan ini memang selalu diupayakan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memberikan perhatian terhadap kedudukan hukum perempuan di Indonesia.¹⁰³

Dalam prakteknya, para hakim dalam membuat keputusan mengenai masalah kewarisan terkadang menyimpang dari Kompilasi dan malah

¹⁰¹ Euis Nurlaelawati, "Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara Kandung", dalam Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 215.

¹⁰² *Ibid.*, h. 224

¹⁰³ *Ibid.*, h. 218-219

mengacu pada kitab- kitab fikih. Selain niat mereka mempertahankan kepentingan umum dimana banyak hakim berpendapat bahwa penyimpangan dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam KHI kadang diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan umum atau untuk menjamin kepuasan keadilan pihak-pihak atau salah satu pihak yang terlibat dalam satu kasus. Kenyataannya bahwa mereka tidak sependapat dengan aturan-aturan yang ada dalam KHI merupakan salah satu alasan mengapa mereka dalam kasus-kasus tertentu tidak sepenuhnya memenuhi sejumlah aturan dalam Kompilasi.¹⁰⁴

L. Kedudukan Anak Perempuan Bersama Saudara Dalam Putusan MA No. 86/K/194

1. Dasar Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.¹⁰⁵

Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi.

Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 220-221

¹⁰⁵ <https://www.pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>

Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

2. Macam Yurisprudensi

a) Yurisprudensi Tetap

Yurisprudensi Tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.

b) Yurisprudensi Tidak Tetap

Yurisprudensi Tidak Tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.

c) Yurisprudensi Semi Yuridis

Yurisprudensi Semi Yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya : Penetapan status anak.

d) Yurisprudensi Administratif

Yurisprudensi Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu

perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.¹⁰⁶

Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Judul atau Nama dari publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitannya misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2006.

Penerbitan buku tersebut biasanya dilakukan setiap tahun. Sedangkan putusan yang diterbitkan oleh Puslitbang adalah hasil kajian atau penelitian terhadap putusan suatu kasus yang dianggap menarik. Penerbitan oleh Puslitbang ini belum dilakukan secara reguler. Sayangnya jumlah eksemplar cetakannya dibatasi, yakni disesuaikan dengan jumlah hakim yang ada di seluruh Indonesia dan jumlah perpustakaan yang akan dikirim publikasi tersebut.

Buku yurisprudensi ini dibagikan secara gratis. Namun karena banyak pihak lain di luar korps hakim dan perpustakaan, khususnya kalangan pengacara, yang ingin memiliki Yurisprudensi MA, maka biasanya pihak MA akan mencari dana di luar dana APBN untuk mencetak lebih banyak lagi buku yurisprudensi tersebut dan menjualnya ke masyarakat yang berminat.

Pendapat Mahkamah Agung pada Putusan MA No 86 /K/194 yang dalam hal ini sekaligus dijadikan dasar pendapat majelis hakim pada Putusan No. 2661/PDT.G/2018: “Selama masih ada “anak”, baik laki laki maupun perempuan maka hak waris dari orang orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orangtua, suami dan isteri menjadi tertutup.” Pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang Ahli tafsir dikalangan sahabat nabi SAW, yang menafsirkan tentang kata “walad” ayat 176 surat an-Nisa yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki laki maupun anak perempuan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ <https://www.pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>

¹⁰⁷ Putusan, No. 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg. h. 32.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, pandangan Ibnu Abbas diuraikan oleh Ibnu Jarir mengatakan bahwa: “jika mayyit meninggalkan seorang anak perempuan yang sebagian adik perempuan, maka ada adik perempuannya tidak mendapatkan bagian”¹⁰⁸

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah dijelaskan diatas sebagai hukum materiil yang digunakan sebagai hakim Peradilan Agama dalam bab III tentang Besarnya Bahagian. Pasal 176 dinyatakan: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian ...”.

KHI Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.¹⁰⁹

Terobosan melalui ijtihad para hakim peradilan agama yaitu “ sepanjang ada anak, maka saudara dan paman menjadi terdinding”¹¹⁰

Dalam Surat An-Nisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika

¹⁰⁸ Tafsir Ibnu Katsir juz II, halaman 442 dalam maktabah syamilah

¹⁰⁹ KHI, Buku II, Pasal 176.

¹¹⁰ Putusan, *Opcit.*, h. 32

mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹¹¹

Lafaz “*walad*” beserta derivatifnya dalam kamus-kamus bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain; anak laki-laki, bayi, bibid, lahir, timbul, terjadi, menyebabkan, menghasilkan, mengasuh, menciptakan dan lain-lain¹¹²

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 2661/PDT.G/2018/PA.SMG

¹¹¹ Depag RI, *Opcit.*, h. 153

¹¹² Ahmad Warsuni Munawwir, *Kamus al-Munawir*, Terj. Zainul Abidin, dkk, *Al-Munawir Arab-Indonesia*, h. 1688

A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Profil Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Semarang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan

Surat Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 tahun 1882. Pengadilan Agama Semarang merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama kelas 1a yang berkedudukan Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5, Karanganyar, Ngaliyan, Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Telp.(024)7600803 Kewenangan pengadilan Agama Semarang dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan hal yang sama pada pengadilan yang lainnya.¹¹³ Kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006. Pada pasal 1 menyebutkan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang:¹¹⁴

¹¹³ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008) h.27

¹¹⁴ Team Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama*, h. 57

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

- b.** Kewenangan relatif (*relative competentie*) yaitu kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah yang sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan sebagai berikut:

	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SEMARANG TENGAH	Kel. Miroto, Kel. Brumbungan, Kel. Jagalan, Kel. Kranggan, Kel. Gabahan, Kel. Kembang Sari, Kel. Sekayu, Kel. Pandansari, Kel. Bangunharjo, Kel. Kauman, Kel. Purwodinatan, Kel. Karang Kidul, Kel. Pekunden, Kel. Pendrikan Kidul, Kel. Pendrikan Lor
2.	SEMARANG UTARA	Kel. Bulu Lor, Kel. Plombokan, Kel. Purwosari, Kel. Kuningan, Kel. Panggung Lor, Kel. Panggung Kidul, Kel. Bandarharjo, Kel. Tanjung Mas, Kel. Dadapsari
3.	SEMARANG TIMUR	Kel. Kemijen, Kel. Rejomulyo, Kel. Mlatibaru, Kel. Kebonagung, Kel. Mlatiharjo, Kel. Bugangan, Kel. Sarirejo, Kel. Rejosari, Kel. Karangturi, Kel. Karang
		Tempel

4.	GENUK	Kel. Penggaron Lor, Kel. Muktiharjo Lor, Kel. Genuksari, Kel. Bangetayu Kulon, Kel. Banjardowo, Kel. Gebangsari, Kel. Bangetayu Wetan, Kel. Sembungharjo, Kel. Kudu, Kel. Karangroto, Kel. Trimulyo, Kel. Terboyo Kulon, Kel. Terboyo Wetan
5.	SEMARANG SELATAN	Kel. Randusari, Kel. Mugassari, Kel. Pleburan, Kel. Wonodri, Kel. Peterongan, Kel. Lamper Lor, Kel. Bulustalan, Kel. Lamper Kidul, Kel. Lamper Tengah, Kel. Barusari
6.	PEDURUNGAN	Kel. Pedurungan Kidul, Kel. Pedurungan Tengah, Kel. Pedurungan Lor, Kel. Penggaron Kidul, Kel. Kalicari, Kel. Tlogomulyo, Kel. Tlogosari Wetan, Kel. Palebon, Kel. Plamongansari, Kel. Tlogosari Kulon, Kel. Gemah Kel. Muktiharjo Kidul
7.	CANDISARI	Kel. Candi, Kel. Jatingaleh, Kel. Jomblang, Kel. Kr. Anyar Gunung, Kel. Tegalsari, Kel. Wonotingal, Kel. Kaliwiru
8.	GAJAHMUNGKUR	Kel. Gajahmungkur, Kel. Bendan Duwur, Kel. Bendan Ngisor, Kel. Sampangan, Kel. Karangrejo, Kel. Lempongsari, Kel. Petompon, Kel. Bendungan
9.	BANYUMANIK	Kel. Banyumanik, Kel. Jabungan, Kel. Pudakpayung, Kel. Pedalangan, Kel. Sronдол Wetan, Kel. Ngesrep, Kel. Padangsari, Kel. Sumurboto, Kel. Gedawang, Kel. Tinjomoyo, Kel. Sronдол Kulon
10.	GUNUNGPATI	Kel. Gunungpati, Kel. Sumurejo, Kel. Pakintelan, Kel. Mangunsari, Kel. Plalangan, Kel. Nongkosawit, Kel. Pongangan, Kel. Ngijo, Kel. Kalisegoro, Kel. Patemon, Kel. Sekaran, Kel. Sukorejo, Kel. Sadeng, Kel. Cepoko, Kel. Kandri, Kel. Jatirejo
11.	SEMARANG BARAT	Kel. Ngemplak Simongan, Kel. Manyaran, Kel. Krapyak, Kel. Kalibanteng Kulon, Kel. Gisikdrono, Kel. Bojong Salaman, Kel. Cabean, Kel. Karangayu, Kel. Krobokan, Kel. Kalibanteng Kidul, Kel. Tambakharjo, Kel. Salaman Mloyo, Kel. Bongsari, Kel. Tawang Mas, Kel. Tawangsari

12.	NGALIYAN	Kel. Ngaliyan, Kel. Podorejo, Kel. Tambakaji, Kel. Wonosari, Kel. Gondoriyo, Kel. Beringin, Kel. Wates, Kel. Kalipancur, Kel. Bambankerep, Kel. Purwosari
13.	GAYAMSARI	Kel. Gayamsari, Kel. Tambakrejo, Kel. Kaligawe, Kel. Sawah Besar, Kel. Siwalan, Kel. Sambirejo, Kel. Pandean Lamper

Tabel 1. Wilayah Kompetensi Pengadilan Agama Semarang

Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan JuruSita Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Peradilan Agama di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

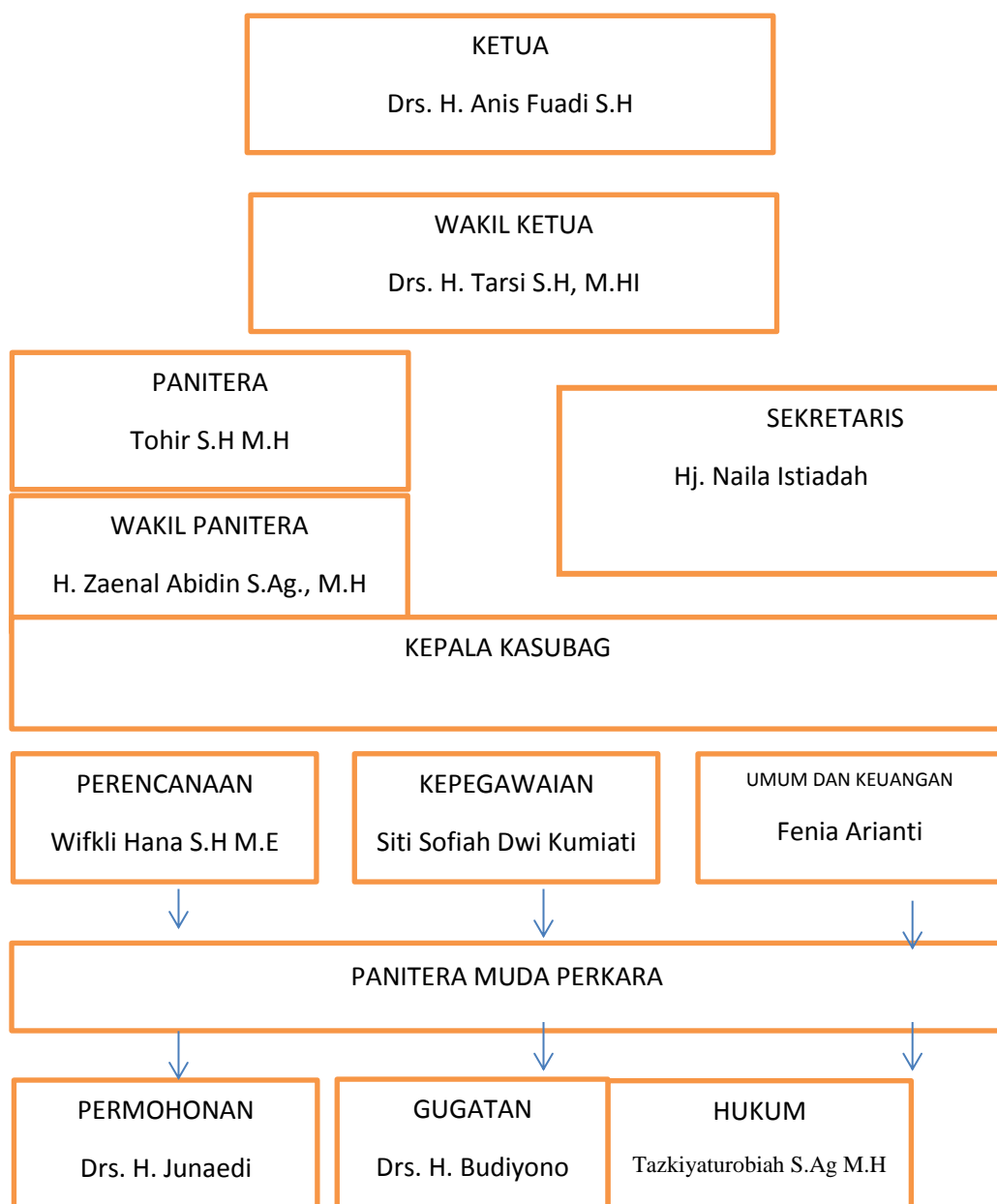
Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:¹¹⁵

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya

¹¹⁵ <http://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang



B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang sebagai Pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara gugat hak waris yang disebabkan oleh Kedua belah pihak bersengketa mengenai pewaris yang berhak mendapatkan hak waris menurut hukum islam dalam hak ashabah ma'al ghair dengan perkara No. 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis akan mengutarakan duduk perkaranya. Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh:

Dita Liselina Nendratirini Binti Drajat Nendro Suwito, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jongke Kidul RT. 07 RW 24. Kelurahan Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai PENGUGAT

MELAWAN

Ir. Hisbaron bin Jamaluddin, umur 65 tahun. Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat jalan pedurungan Kidul II Rt 06 Rw 01, Kelurahan Pedurungan Kidul, kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sebagai TERGUGAT

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan perkara Gugat Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA. Smg tanggal 17 Oktober 2018 dengan perbaikan gugatan tertanggal 27 Desember 2018 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Penggugat adalah anak dari hasil perkawinan antara Bapak Drajat Nedro Suwito dan Ibu Sri Sumekti yang menikah pada tahun 1970, sedangkan ibu Sumekti anak dari Bapak Said yang meninggal tahun 1993 dan ibu Mujirah yang meninggal pada tahun 2008;
2. Kelahiran Penggugat tanggal 28 Agustus 1973 telah dicatat dikantor Dinas penduduk dan Catatan sipil Kota Yogyakarta dengan Akte kelahiran Nomer : 525/K/1990;
3. Pada tahun 1976 orangtua Penggugat yaitu Bapak Drajat Nedro Suwito dan Ibu Sri Sumekti bercerai;
4. Sejak saat itu Penggugat masih berumur 3 (tiga) tahun, dan Penggugat diasuh oleh ibu Sri Sumekti;
5. Setelah bercerai Penggugat ikut Ibu Sri Sumekti pindah di Semarang dan membeli serta menempati rumah yang beralamat di jalan pedurungan Kidul II Rt 06 Rw 1 Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
6. Rumah tersebut diatas pada saat dibeli bentuk surat kepemilikannya masih leter (Ibu Kandung Penggugat);
7. Tahun 1982 Ibu Sri Sumekti menikah dengan tergugat, dan tidak mempunyai anak dalam perkawinan tersebut hingga Ibu Sri Sumekti meninggal dunia pada tanggal 13 september 2013;
8. Perkawinan Tergugat Tersebut Ibu Sri Sumekti (Ibu kandung penggugat) sudah memiliki tanah rumah seperti tersebutdalam posita nomer 5 diatas, dan penggugat perinci pada posita nomer 9 dibawah ini ;
9. Sebelum pernikahan sudah memiliki rumah tanah SHM No. 298 luas 2014 m2 nama pemilik Sri Sumekti terletak pada pedurungan kidul II Rt O6 Rw 1 Kel. Pedurungan kidul kec. Pedurungan kota semarang berbatasan dengan :

Utara	: Pak Tris/Bu Anik
Selatn	: Jalan
Barat	: Pak Kandar

Timur : Pak Satyo

10. Setelah pernikahan Ibu Sri Sumekti (Ibu Kandung Penggugat) dengan tergugat telah memberi tanah rumah yang terletak :

1. Rumah tanah SHM no. 1368 luas 147 m2 nama pemilik sri sumekti terletak di Pedurungan kidul terletak Rt4 Rw 1 Kelurahan Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang
2. Rumah tanah SHM no.2720 luas 205 nama pemilik Jl. Gaharu Raya Rt 6 Rw 9 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang
3. Rumah tanah SHM 2719 luas 201 m2 Dijalan Gaharu Raya Rt 6 Rw 9 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang
4. Rumah tanah SHM no. 00757 luas 608 m2 nama pemilik tergugat terletak di Desa Wates Kec. Getasan Kabupaten Semarang

11. Pada tanggal 13 september 2013 Ibu Sri Sumekti (Ibu Kandung Penggugat) meninggal dunia dan Rumah tanah baik yang dimiliki Ibu Sri sumekti (Ibu Kandung Penggugat) pada butir 9 Rumah Tanah SHM No. 298 maupun rumah tanah yang dibeli setelah pernikahan Ibu Sri Sumekti (Ibu Kandung Penggugat) dengan tergugat SHM No. 1368, SHM No 2720, SHM No 2719, dan SHM No. 00757, kini masih dikuasai tergugat dan belum dibuatkan akta waris

12. Rumah Tanah pada butir SHM No. 298 yang terletak di jalan Pedurungan Kidul Rt 06 Rw 07 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang adalah hak waris sepenuhnya milik Penggugat.

13. Peninggalan Rumah Tanah yang dibeli oleh Ibu Sri Sumekti (Ibu Kandung Penggugat) dengan Tergugat seperti pada Posita No. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 adalah Penggugat mempunyai Hak Waris karena hingga sekarang belum dibagi waris menurut Hukum Islam maupun Undang undang yang lain yang berlaku.

14. Oleh karena Posita No. 13 tersebut diatas Penggugat mempunyai hak atas peninggaaalan atas Ibu Sri Sumekti (Ibu Kandung Penggugat) 50% dari seluruh Rumah Tanah Ibu Sri Sumekti
15. Penggugat khawatir akan seluruh Tanah Rumah peninggalan Ibu Sri Sumekti akan dipindah tangankan oleh Tergugat oleh karena itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sudi kiranya meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) atas seluruh tanah Peninggalan Ibu Sri Sumekti (Ibu Kandung Penggugat).

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menetapkan Harta Peninggalan pada posita 9 adalah sebagai harta peninggalan orantua Penggugat/ Pewaris tunggal
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam posita 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 adalah 50% peninggalan orangtua Penggugat/ Pewaris;
4. Menetapkan Penggugat adalah Ahli Waris Sri Sumekti ;
5. Meletakkan sita jamin (Conservatoir Beslag) seluruh harta Ibu Sri Sumekti;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing ;
7. Membebankan biaya perkara tergugat.

SUBSIDIER

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 2661/

Pdt.G/2018/PA.Smg

Dasar dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang No. 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg tentang tidak berlakunya Ashabah Ma'al Ghair yaitu :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf B Undang undang No 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang undang No 3 tahun 2006 dan undang undang No. 5 tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara kewarisan antara orang orang yang beragama islam maka merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;
2. Penggugat dan tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir dan diupayakan damai baik oleh majelis hakim maupun proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H., yang dilakukan pada tanggal 06 Desember 2018 namun tidak berhasil;
3. Gugatan ini adalah mengenai gugatan waris dari Almarhumah Sri Binti Said yang meninggalkan harta waris sebagaimana tercantum dalam posita no 9 dan 10.1, 10.2, 10.3, 10.4.
4. Selain harta waris Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Anak Perempuan Tunggal Kandung dari Sri Sumekti Binti Said, disamping itu Pewaris juga meninggalkan suami, bernama Ir. Hisabaron bin Jamaluddin sebagai Tergugat;
5. Selain harta waris. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak perempuan tunggal kandung dari Sri Sumekti binti Said. disamping itu Pewaris juga meninggalkan suami bernama Ir Hisbaron bin Jamaludin sebagai Tergugat;
6. Penggugat mendalilkan bahwa selaku anak perempuan kandung tunggal dari pewaris mendapatkan hak waris sepenuhnya atas harta waris sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 12:
7. Terhadap harta waris lainnya (10.1,10.2,10.3 dan 10.4) sebagaimana posita nomor 13 dan 14 Penggugat mendalilkan mempunyai hak waris 50% atau seperdua dari harta waris;
8. Sebelum mempertimbangkan tentang pokok Perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat nomor 5 agar Majelis

Hakim meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta peninggalan Sri Sumekti binti Said (Pewaris);

9. Sita Jaminan adalah sita yang diajukan oleh kreditur terhadap harta milik debitur (Tergugat) sebagaimana maksud pasal 227. 197. 198 dan 199 HIR. sebagai jaminan pelunasan utang
10. Sesuai dengan pasal 227 HIR untuk mengajukan permohonan sita jaminan elemen dugaan yang beralasan merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut.
11. Oleh karena kedudukan dan kepemilikan harta waris tersebut belum jelas dan tidak beralasan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;
12. Tergugat telah memberikan jawaban'dan dupliknya yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Dalam eksepsi:

1. Tergugat mendalilkan pada saat meninggal dunia Sri Sumekti binti Said (Pewaris) meninggalkan 3 orang ahli waris, yaitu 1. Penggugat sebagai anak perempuan tunggal (bintun), 2. Tergugat sebagai suami (zauj). dan 3. Endang Suliarsih binti Said. sebagai saudara perempuan kandung (ukhtun syaqiqah) yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2016. memiliki ahli waris 3 orang anak. yaitu Renaldy Yulius (42 tahun), Devi Savitri Yulius (36 tahun). dan Renaldo Yulius (35 tahun), maka kedudukan anak-anak almarhumah Endang Suliarsih binti Said tersebut sebagai ahli waris Pengganti ibunya (ukhtun syaqiqah) wajib dijadikan sebagai pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak (plurium titis consortium) dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan. karena yang dimaksud ahli waris adalah ada hubungan darah garis keturunan kebawah yaitu anak dan garis keturunan keatas yaitu orang tua. sedangkan saudara adalah menyamping. oleh karena itu Penggugat dengan ibu Sri Sumekti binti Said adalah

hubungan ibu dan anak kandung. maka dengan keadaan ibu Sumekti binti Said yang mempunyai anak kandung Penggugat. maka hubungan dengan adik (ukhtun Syaqqah) ibu Sri Sumekti binti Said adalah menyamping terhijab (tertutup). tidak dapat waris dari ibu Sri Sumekti binti Said;

3. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh ummat Islam di dunia. Sungguhpun demikian corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar Hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama disamping pendapat para ulama yang tersebar dalam kitab Hqih. Gagasan pembaharuan hukum kewarisan telah dilakukan melalui ijtihad para Hakim Peradilan Agama dalam putusan-putusan atas sebuah perkara atau sering disebut dengan Yurisprudensi. Terobosan dalam hukum kewarisan antara lain “sepanjang ada anak, maka saudara dan paman menjadi terdinding”;
4. Persoalan anak perempuan Pewaris menghijab saudara Pewaris tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam. akan tetapi ketentuan ini didapatkan dari Yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995;
5. Majelis Hakim merasa perlu untuk menyampaikan pendapat Mahkamah Agung yang dalam hal ini sekaligus dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim yaitu : "Selama masih ada “anak”, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup" ;
6. Pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir yang mu'tabar di kalangan sahabat Nabi SAW yang menafsirkan kata “walad” pada ayat 176 Surat an-Nisa yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan;
7. Tafsir Ibnu Katsir, pandangan Ibnu Abbas ini diuraikan oleh Ibnu Jarir dan rekan-rekannya meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa : “Jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang adik perempuan, maka adik perempuan tidak mendapatkan

bagian” (Lihat tafsir Ibnu Katsir Juz II, halaman 442 dalam Maktabah Syamilah);

8. Berdasarkan pertimbangan-penimbangan tersebut diatas maka Endang Suliarsih binti Said (ukhtun syaqiqah) menjadi terdinding, oleh karenanya eksepsi tergugat dinyatakan ditolak

Dalam Pokok Perkara :

1. Penggugat dalam surat gugatnya yang telah dilakukan perbaikan telahh mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak perempuan tunggal kandung dari Sri Sumekti binti Said, disamping Itu Pewaris juga meninggalkan suami bernama Ir Husbaron bin Jamaludin sebagai Tergugat,
2. Penggugat mendalilkan setaku anak perempuan kandung tunggal dari pewaris mendapatkan "hak waris sepenuhnya" atas harta waris sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 12 dan pada eksepsi angka 2;
3. Terhadap harta waris lainnya (10.1,10.2,10.3 dan 10.4) sebagaimana posita nomor 13 dan 14 Penggugat mendalilkan mempunyai hak waris 50% atau seperdua dari harta waris;
4. Dalam petitum angka 3 Penggugat menyebutkan objek harta yang disengketakan sebagaimana tersebut dalam posita nomor 10 hanya berupa angka-angka yang seharusnya disebutkan secara jelas dan lengkap. sehingga menjadikan petitum tersebut tidak jelas atau kabur;
5. Setiap petitum harus sejalan dengan dalil gugatan dan tidak boleh saling bertentangan dan harus berkesuaian dengan dasar hukum dan fakta dalam posita serta menunjukkan deskripsi yang jelas menyebut satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat kepada Tergugat;
6. Selama berjalannya persidangan baik secara ngan maupun dalam reptiknya Penggugat trdak menyampaikan pengelasan lagi untuk memperjelas tuntutan yang tertuang dalam pemu angka 3 tersebut;
7. Yang digugat dalam hak ini adalah harta peninggalan Sn Sumeku bmi: Said. yang maseh mempunyai suami (duda) Yang masih hidup yakm 1r Hisbaron bin Jamaludin dan dijadikan sebagai Tergugat, namun dalam petitum angka

- 1 sampai 7 tidak mencantumkan Tergugat sebagai ahli waris dari Sri Sumekti binti Said yang merupakan suami dari Pewaris (Sri Sumekti binti Said). tahu-tahu pada petitum mencantumkan agar "menetapkan Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dengan sukarela dan seterusnya":
8. Duda/janda, berdasarkan ketentuan pasal 174 (b) Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris. namun dalam hal ini Tergugat sebagai duda dari Sri Sumekti binti Said (pewaris). tidak dimasukkan sebagai ahli waris, maka gugatan ini menjadi kabur (obscur libel);
 9. Dari pertimbangan tersebut. maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (obscur libel), vide ketentuan pasal 8 (3) Rv. Dan Putusan MA. No. 239 K/SIP/1968;
 10. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 11. Terkait dengan tuntutan Penggugat petitum Penggugat nomor 5 agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (conserve beslag) atas seluruh harta peninggalan Sri Sumekti binti Said (Pewaris). oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka secara otomatis tuntutan tersebut menjadi tidak relevan lagi, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;
 12. Terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pokok perkara ini sudah dinyatakan tidak dapat diterima. maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya harus dikesampingkan;
 13. Oleh karena perkara ini adalah perkara waris (perdata murni), maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dalam hal ini adalah para Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 131 (1) HIR

BAB IV

PENGESAMPINGAN ASHABAH MAAL GHAIR PADA PUTUSAN NOMOR 2661/PDT.G/2018/PA.SMG

A. Analisis Dasar Putusan Pengadilan Agama Semarang Pada Perkara No.2661/Pdt.G/2018/PA.Smg

Pengadilan Agama merupakan tempat mencari keadilan bagi umat muslim yang ada di Indonesia dan Pengadilan Agama adalah instansi peradilan khusus yang dibentuk negara untuk menangani perkara umat islam yang berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan hukum islam, oleh karenanya bagi umat islam berhak mendapatkan keadilan pada instansi ini. Selain itu, Hakim memutuskan segala keputusan secara adil dan berimbang sesuai syariat islam untuk keadilan seluruh pihak yang berperkara.

Hakim sebagai pejabat peradilan yang berwenang mengadili, Hakim Pengadilan di Seluruh Indonesia, dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk dijadikan sebagai dasar hukum, serta agar tidak menjadikan suatu putusan cacat hukum, selain itu supaya tidak membuat putusan yang tidak adil.

Jika melihat secara sekilas, putusan Pengadilan Agama di atas tidak kuat dan tidak sesuai dengan hukum islam yakni mendasarkan pada Yurisprudensi MA dan berdasarkan KHI serta pendapat Ibnu Abbas.

Namun setelah penulis meneliti secara mendalam dengan mempelajari dan memahami keseluruhan permasalahan, mulai dari kronologi perkara, gugatan yang diajukan, bukti-bukti yang telah diperiksa, pertimbangan hukum dan putusan serta menganalisis dengan interogasi filosofi, maka dapat ditemukan titik keadilan yang ingin dicapai pada putusan Pengadilan Agama ini.

Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Agama berpendapat bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris kecuali orang tua, suami, dan istri menjadi tertutup (terhijab). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata “walad” pada ayat 176 Surat An-Nisa yang berpendapat pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu dalam perkara waris ini dengan adanya si Penggugat (anak perempuan), maka saudara perempuan kandung menjadi terhijab untuk

mendapat warisan.

Majelis hakim dengan menafsirkan makna kata “walad” dalam surat An-Nisa ayat 176 mengenai kewarisan anak bersama saudara ialah anak baik laki-laki maupun perempuan merupakan upaya hakim untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya dengan menggali dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Agama ini juga menekankan pada dasar dari Kompilasi hukum islam yang merupakan hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan pengadilan Agama disamping pendapat para ulama’ yang tersebar dalam kitab fiqh, hal ini disebutkan hakim dalam putusan sebagai dasar putusan ini. Adapun, Buku II Pasal 176 merupakan dasar dari putusan yang berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan” dalam Kompilasi Hukum Islam makna “walad” menggunakan pendapat Ibnu Abbas seorang ahli tafsir mu’tabar pada masa Nabi Saw.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh ummat Islam di dunia. Corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar Hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama disamping pendapat para ulama yang tersebar dalam kitab fiqh. Gagasan pembaharuan hukum kewarisan telah dilakukan melalui ijtihad para Hakim Peradilan Agama dalam putusan-putusan atas sebuah perkara atau sering disebut dengan Yurisprudensi. Terobosan dalam hukum kewarisan antara lain “sepanjang ada anak, maka saudara dan paman menjadi terdinding”.

Dalam hal ini Sri Sumekti binti Said (Pewaris) meninggalkan 3 orang ahli waris, yaitu 1. Penggugat sebagai anak perempuan tunggal (bintun), 2. Tergugat sebagai suami (zauj). dan 3. Endang Suliarsih binti Said. sebagai saudara perempuan kandung (ukhtun syaqiqah) yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2016. memiliki ahli waris 3 orang anak. yaitu Renaldy Yulius

(42 tahun), Devi Savitri Yulius (36 tahun). dan Renaldo Yulius (35 tahun), maka kedudukan anak-anak almarhumah Endang Suliarsih binti Said (Ashabah Ma'al Ghair) tersebut sebagai ahli waris Pengganti ibunya (ukhtun syaqiqah) wajib dijadikan sebagai pihak.

Hasil wawancara terkait hukum kewarisan Islam yang seharusnya dipakai menurut pendapat Dra. Hj. Mahmudah M.H sebagai Majelis Hakim dalam perkara putusan ini maka akan ditemukan sebagai berikut :

Pertama, kasus ini termasuk perkara waris (perdata murni), karena pewaris meninggalkan anak perempuan kandung, suami dan saudara perempuan kandung. Dengan menimbang menurut Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi saudara kandung perempuan terdinding sehingga hanya Suami dan Anak perempuan kandung tunggal yang menjadi Ahli waris.

Kedua, Dra. Hj. Mahmudah M.H, memandang bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kesetaraan dan keseimbangan, sehingga makna "walad" pada an-Nisa: 176 diartikan sebagai anak perempuan maupun anak laki-laki.

Ketiga, Dra. Hj. Mahmudah M.H, saudara yang menjadi ahli waris harus dalam keadaan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Jadi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal tidak berhak mewarisi harta waris dari pewaris, dan anak anak dari pewaris yang meninggal dunia juga tidak berhak atas harta waris.

Keempat, dalam memutuskan perkara Dalam menetapkan hukum, Dra. Hj Mahmudah M.H, memposisikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan, yang merupakan hukum islam ala Indonesia yang disesuaikan dengan masyarakat dan kondisi di Indonesia.

Dalam memutus putusan Dra. Hj Mahmudah M.H juga mengkategorikan ayat ayat waris sebagai dasar utama dalam mempertimbangkan segala putusan. Ayat ayat waris ini sangat penting dalam legalisasi hukum islam meskipun mempunyai tafsir dan pendapat yang berbeda beda.

Dari surat an-Nisa ayat 176, diketahui bahwa apabila tidak ada anak maka saudara mendapatkan setengah harta, menjadikan batasan bahwa apabila ada anak maka saudara menjadi terhijab.

Dipertegas lagi oleh Dra. Hj Mahmudah M.H, bahwa ketentuan dalam masalah waris islam, wajar bila ulama' berbeda beda pendapat tergantung kondisi, dari putusan tersebut gugatan penggugat tidak diterima dikarenakan gugatan kabur dan hakim belum memutuskan berapa masing masingnya.

Namun demikian dalam putusan tersebut gugatan penggugat (anak kandung Sri Sumekti binti Said) meminta gugatan 50 % harta dan tidak menganggap adanya ashabah maal ghair ditolak karena dalil gugatan tidak sesuai dengan petitum

B. Analisis Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg Islam mengatur segala permasalahan waris yang bersumber hukum dari Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam hukum waris islam, pembagian waris menurut hukum Islam berlaku mutlak bagi umat Islam. Dalam Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2018/PA. Smg, bahwa Hukum Islam dalam putusan tersebut berlaku dengan berbeda pandangan dengan hukum Islam secara umum. Karena, Majelis Hakim mempunyai pandangan keadilan lain terhadap putusan tersebut namun berbeda dengan dalil syar'i yang ada.

Menurut penulis hukum Islam secara umum, Sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan Hadist, meskipun begitu terdapat sumber hukum lain yang dipakai dalam putusan tersebut yang membuat putusan ini tidak kuat hukumnya menurut hukum waris Islam.

Pada putusan nomor 2661/Pdt.G/2018/PA. Smg, pertimbangan majelis hakim yang diketuai oleh Dra. Hj Mahmudah M.H dalam memutuskan perkara ini yang pertama adalah yurisprudensi yang merupakan terobosan bagi hakim untuk membuat gagasan pembaharuan hukum kewarisan, terobosan dari yurisprudensi ini telah melalui ijtihad para Hakim Peradilan Agama dalam sebuah putusan-putusan atas sebuah perkara yang berbunyi "Sepanjang ada anak, maka saudara dan paman menjadi terdinding"

Namun penulis berpendapat lain apabila terdapat hadist shahih yang seharusnya dijadikan sumber hukum dalam mempertimbangkan hukum dan ijtihad serta pendapat yang dijadikan dasar hukum ada tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i.

Dalam hukum faraid, ahli waris nasabiyah tidak semata-mata keatas (ushulul warits) dan kebawah (furu'ul warits), tapi juga menyamping (al-hawasyi)¹¹⁶

Yurisprudensi diatas yang dipakai dalam putusan akan bertentangan dengan nash Al-Quran karena dalil yang digunakan oleh jumhur ulama' ahlusunnah lebih kuat dibandingkan dengan pendapat dari Ibnu Abbas. Bahwa menurut jumhur ulama' ahlusunnah sesuai dengan hadist shahih bukhori sedangkan Ibnu Abbas merupakan pendapatnya sendiri. Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 12 dan ayat 176 secara tegas telah menyebut bahwa saudara-saudara, baik kandung, seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan menyebut bahwa saudara perempuan adalah termasuk kelompok ahli waris (golongan ashabul furudl nasabiyah al-hawasyi). (Vide Prof. DR. Ahmad Rofiq, MA, Fiqh Mawaris, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo- Jakarta, 2002, halaman 63-64). Begitupun KHI dalam Pasal 174 ayat (1)

Menurut penulis seharusnya saudara perempuan sekandung (ukhtun syaqiqah) kedudukannya sama sekali tidak mahjub (terhalang) oleh anak perempuan. Yang benar adalah jika ukhtun syaqiqah tersebut bersama anak perempuan, menurut semua kitab faraid bagian warisnya adalah ashabah ma'al ghoir (Vide Drs. Fatchur Rahman, Ilmu Waris, PT. Al-Ma'arif-Bandung, 1981, halaman 299)

Sesuai pengertian menurut DR. Rofiq. Ashabah ma'al ghoir adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (al-furudl al-muqaddarah). Yang berhak menerima bagian ashabah ma'al ghair tersebut antara lain adalah saudara sekandung (seorang atau lebih) bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. (Vide Prof. DR. Ahmad Rofiq, MA, Fiqh Mawaris, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo- Jakarta, 2002, halaman 75)

Praktek pembagian waris ashabah ma'al ghoir ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang, sebagaimana hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

قضى النبي صلى الله عليه و سلم: للابنة النصف و لابنة الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقي
فلأخت

Artinya : “Nabi Muhammad Saw memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan (ashabah ma'al ghoir)” (**Shohih Bukhari**, Jilid 8, bab kitabul faraid, Penerbit maktabah rusyd, Riyad, Saudi Arabia, halaman 350)

Bagian *ashabah ma'al ghoir* bagi *ukhtun syaqiqah* jika bersama anak perempuan juga disebutkan dalam beberapa hadits shohih yang lain dalam Kitab Shahih Bukhari :

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة و ابنة ابن و أخت، فقال: للابنة النصف و للأخت النصف و أخت ابن عباس فسيتابعني، فسئل ابن عباس و أخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه و سلم: للابنة النصف و لابنة الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فلأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا فيكم (الحديث ٦٧٣٦، طرفه في ٦٧٤٢).

Artinya : “Telah berkata Adam kepada kami, telah berkata Syu’bah kepada kami, telah berkata Abu Qais kepada kami : aku mendengar Huzail bin Syarhabil berkata : Abu Musa pernah ditanya tentang (bagian waris) anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka berkata Abu Musa : anak perempuan mendapat bagian seperdua dan saudara perempuan juga mendapat bagian seperdua. Datangilah Ibnu Abbas dia akan mengikuti (pendapat) ku, maka ketika Ibnu Abbas ditanyadan disampaikan pendapat Abu Musa ia (Ibnu Abbas) menjawab : Kalau begitu aku telah sesat (keliru) dan aku bukan bagian dari orang yang mendapat petunjuk dan aku memutuskan tentangnya sebagaimana yang telah diputuskan nabi Muhammad SAW, yakni : untuk anak perempuan mendapat bagian seperdua, dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian seper enam, sebagai penyempurna dua pertiga, dan **sisanya adalah untuk saudara perempuan (ashabah ma’al ghoir)**. Maka kami mendatangi Abu Musa dan menyampaikan padanya pendapat Ibnu Mas’ud, kemudian ia berkata : jangan kalian tanya saya selama kemampuan tentang hal ini kalian miliki”. (Vide : Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab Faraid, Bab Mirats ibnah al-Ibn ma’a ibnih, Hadits Nomor 6736, Beirut, Dar Ibnu Katsir, Cet. I, 2002 M/1423 H, hlm.1669)

Jadi hadist shahih diatas adalah dasar dari ashabah maal ghair yang seharusnya berlaku pada putusan ini. Karena, meskipun putusan tersebut baik namun tidak boleh menyimpang dari nash dan hadist yang berlaku. Selain itu terdapat dalam kitabnya Wahbah Zuhailly untuk menguatkan dalil hadist diatas sekaligus bukti bahwa ashabah maal ghair dari dahulu dipakai untuk memutuskan bagian waris yang berbunyi :

بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة و عدم المعصب، تكملة للثلثين لما رواه الستة إلا النسائي عن هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن ابنة و ابنة ابن و أخت، فقال: للابنة النصف، و للأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود، و أخبر بقول أبي موسى الأشعري فقال: لقد

ضللت إذا، و ما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه و سلم: البنت النصف، و لابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، و ما بقي فلأخت.

Artinya : “Cucu perempuan garis laki-laki atau lebih, beserta satu anak perempuan, dalam kasus tiada penerima ashabah, maka ada bagian sebagai penyempurna dari dua pertiga sebagaimana yang diriwayatkan oleh 6 imam kecuali imam Nasa’iy dari Huzail bin Syarhabil, bahwasanya ia berkata : Abu Musa pernah ditanya tentang (bagian warits) anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan, maka berkata Abu Musa : Anakperempuan mendapat bagian seperdua, dan saudara juga mendapat bagian seperdua. Datangilah Ibnu abbas, maka dia akan mengikuti (pendapat)ku, maka ketika Ibnu Abbas ditanya dan disampaikan pendapat Abu Musa, ia (Ibnu Abbas) menjawab : Kalau begitu aku telah sesat (keliru), dan aku bukan bagian dari orang yang mendapat petunjuk, aku memutuskan tentangnya sebagaimana yang telah diputuskan oleh nabi Muhammad SAW, yakni : untuk anak perempuan mendapat bagian seperdua, dan anak perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan **sisanya adalah untuk saudara perempuan (ashabah ma’al ghoir)**”.(Vide : Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al- Islamy wa adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, Juz II, 1985/1405, Cet.II, hlm.293)

Berdasarkan hadits-hadits diatas, maka tidak benar saudara perempuan (ukhtun syaqiqah) mahjub oleh anak perempuan, karena dalam praktek, nabi pun memberikan bagian ashabah untuk saudara perempuan jika bersama dengan anak perempuan. Bahkan dalam dua hadis diatas, Ibnu Abbas sendiri mengakui kekeliruannya dalam menetapkan bagian waris dan membenarkan praktek pembagian waris sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni mendapatkan bagian sisa, yang kemudian ilmu faraid menyebutnya sebagai *ashabah ma’al ghoir*

Pada saat itu Ibnu Abbas baru berusia 13 (tiga belas) tahun ketika Rasulullah meninggal dunia (Vide : Manna Khalil Qattan, *Studi ilmu-ilmu Al-Qur’an*, terjemah: Mudzakir AS, Bogor : Lentera Antar Nusa, 2007, hlm : 522), sehingga wajar jika ada beberapa hadits yang tidak diketahuinya, mengingat saat itu hadits masih tersebar dalam hapalan para sahabat dan belum dikumpulkan.

Ashabah ma’al ghoir dipertegas pula oleh Imam Nawawi yang artinya : “Apabila para ahli waris berkumpul semuanya, maka yang berhak mewarisi adalah : anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri dan

saudara perempuan sekandung”. (Vide : Yahya bin Syarif An-Nawaai, *Raudlatu Al-Thalibin wa umdatu al-muftin*, Juz VI, Beirut, al-Maktabah al-Islamy, 1991, hlm.5)

Jadi, Yurisprudensi Nomor 85 K/194 tanggal 28 April 1995 dan KHI yang menghijab kedudukan saudara perempuan oleh anak perempuan (meniadakan ashabah ma’al ghoir) yang dipakai hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam putusan Nomor 2661/Pdt.G/PA.Smg tidak dapat dipegangi karena bertentangan dengan hadits yang shohih yang bernilai *qoth’iyyu al-wurud wa qoth’iyyu al-dalalah* semua putusan menurut penulis tidak bisa dijadikan dasar hukum

Dalam ushul fiqh, terdapat metode ijtihad hakim yakni istihsan. Istihsan adalah hukum pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku umum, untuk diterapkan pada kasus-kasus yang sedang berada dalam kondisi tertentu sehingga menghendaki pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syariat. Jadi pada kasus tertentu dalam pandangan hakim bilamana ketentuan-ketentuan/pertimbangan hukum yang biasa dipakai secara umum diterapkan dalam kasus seperti itu, akan bertentangan dengan kemashlahatan atau akan bertentangan dengan tujuan syari’at.¹¹⁷

Memang Ijtihad dalam hukum Islam diperbolehkan termasuk menggunakan pendekatan *Urf* (adat), tapi ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap nash yang *qoth’iy*, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahhab Khollaf : “Tidak boleh melakukan ijtihad dalam masalah yang sudah ada nashnya secara *qoth’iy*”. (Vide : Abdul Wahhab Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Maktabah ad-Dakwah al-Islamy, tanpa tahun, hlm.216)

Jadi, apabila menurut Dra. Hj Mahmudah M.H (Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang) yang berpendapat bahwa hukum islam sifatnya dinamis dan fleksibel sesuai dengan kondisi serta keadaan, yang diakui sebagai

¹¹⁷ Satria Effendi *Opcit.*, h. 305-306.

pembaruan hukum waris karena mementingkan aspek keadilan dan keseimbangan hal itu tidak diperbolehkan sesuai penjelasan diatas.

Pertimbangan hakim menggunakan kompilasi hukum islam yang merupakan hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan pengadilan Agama disamping pendapat para ulama' yang tersebar dalam kitab fiqih, hal ini disebutkan hakim dalam putusan sebagai dasar putusan ini. Adapun, Buku II Pasal 176 merupakan dasar dari putusan yang berbunyi "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*"

Secara umum KHI mengambil doktrin fikih tradisional dan merujuk pada nash-nash Al-Quran yang cocok, misalnya memberikan anak laki-laki bagian waris yang sama besarnya dengan dua anak perempuan dan mempertahankan aturan ashabah bahwa saudara laki-laki yang terdekat mendapat sisa. Namun, dipengaruhi adat dan norma-norma setempat, KHI menerapkan aturan-aturan lain, seperti sistem ahli waris pengganti dan wasiat wajibah yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih manapun. Sedangkan dalam kasus ini telah jelas ada pada hadist shahih bukhori.

Dalam Kompilasi Hukum Islam makna "walad" menggunakan pendapat Ibnu Abbas seorang ahli tafsir mu'tabar pada masa Nabi Saw. Sehingga Hakim memutuskan sebagai berikut :

Suami : Ir. Hisbaron bin Jamaludin (tergugat) sebagai ahli waris dari (Sri Sumekti binti Said), sesuai Kompilasi Hukum Islam

Anak : Dita liselina Nendratirini Drajat Nedro Suwito (Penggugat), mendalilkan 50% harta waris, namun Gugatan tidak jelas dan kabur sehingga hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan bisa jadi putusan itu dijatuhkan, pembagiannya akan menjadi *Ukhtun syaqiqah* itu mahjub oleh Penggugat selaku anak perempuan, maka bagian warisnya bukan seperti yang

Penggugat mau, yakni Tergugat selaku suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan sisanya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) menjadi bagian Penggugat. Melainkan yang benar adalah bagiannya Tergugat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah). Adapun sisanya yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) dikembalikan secara berimbang kepada ahli waris melalui skema pembagian **Radd**.

Radd adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian ashabul furudl. Terjadinya masalah radd apabila pembilang lebih kecil dari pada penyebut dan merupakan kebalikan dari masalah Aul. Dalam kasus terjadinya Radd, maka sisa bagian warisan dikembalikan kepada semua ahli waris secara proporsional, bukan menjadi hak milik Penggugat saja, seperti dalam surat gugatannya.

Menurut penulis, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di atas berupaya memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hukum meskipun bertentangan dengan aturan yang berlaku atau biasa diterapkan yakni Al-Quran, Hadist dan Pendapat jumhur ulama.

Namun pendapat penulis sudah sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Ahmad Rofiq. M.A Bahwa anak perempuan mendapatkan waris, apabila ada saudara perempuan maka saudara perempuan mendapatkan ashabah ma'al ghair.

Sehingga menurut Dra. Hj. Mahmudah M.H, pembagian harta waris yang pewarisnya adalah anak perempuan bersama saudara perempuandan saudara perempuan terhijab karena saudara perempuan jauh hubunganya dengan mayyit, tidak sesuai dengan pedoman kita yaitu hadist dan para jumhur ulama'.

Kemudian pengambilan pendapat ulama yang dilakukan Pengadilan Agama di atas memang merupakan sebuah usaha menemukan hukum Islam baru. Usaha ini sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 yakni hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi untuk mencapai titik keadilan, hakim dapat menginterpretasikan nilai-nilai hukum dalam penyelesaian suatu perkara namun kasus kasus yang tidak ada dalil qath'i

Kemudian penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama ini pun

telah melakukan kesetaraan dan keadilan jender dan tidak memberlakukan ashabah maal ghair sesuai syariat islam. Dimana meletakkan keadilan bukan karena kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin, namun pada kebenaran yang ada. Pada putusan PA tersebut, anak perempuan dengan kondisi atau latar belakang masalah yang dihadapi dirasa adil mendapatkan seluruh harta warisan.

Menurut penulis, seharusnya dalam pertimbangan hukum putusan PA ini disampaikan secara jelas bahwa penerapan hukum (yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas) yang diambil oleh majelis hakim dikarenakan perkara ini bersifat kasuistik (dalam kondisi tertentu), sehingga dapat keluar dari aturan atau ketentuan secara umumnya dan memutuskan ketentuan lain. Dan seharusnya dijelaskan bahwa hal ini untuk pembaruan hukum islam terkait kondisi dan tradisi yang mempengaruhi agar tidak menimbulkan kontra terhadap hukum islam. Jika hal ini disampaikan dalam putusan, maka jelas bahwa tujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya telah ditegakkan pada putusan ini.

Dari ayat dan hadist diatas menurut hemat penulis adalah jelas apabila dalam menentukan putusan yang berkekuatan hukum tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum dari Al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam putusan tersebut mengenyampingkan hadist dan menggunakan ijtihad, serta pendapat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada putusan No.2661/Pdt.G/2018/PA.Smg, Majelis hakim menolak gugatan dari penggugat dikarenakan gugatan tidak sesuai dengan petitum, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku pada pasal 176 dan pendapat Ibnu Abbas yang memaknai "*Walad*" sebagai laki-laki maupun perempuan. Pandangan Ibnu Abbas ini diuraikan oleh Ibnu Jarir dan Rekan-rekannya meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa : "Jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang adik perempuan, maka adik perempuan tidak mendapatkan bagian" (tafsir Ibnu Katsir Juz II, halaman 442 dalam Maktabah Syamilah) Menurut majelis hakim bahwa pertimbangan tersebut untuk pembaruan hukum Islam dengan mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan. Putusan PA ini akhirnya memberikan keadilan dan kesetaraan jender, dimana keadilan itu harus diletakkan pada tempat/hak yang seharusnya. Karena keadilan itu tidak melihat perbedaan jenis kelamin.
2. Hukum waris Islam yang berlaku pada Putusan PA ini adalah mengesampingkannya ashabah maal ghair sebagaimana hadist-hadist shahih bukhori yang ada dan sudah dipraktekkan dari zaman Rasulullah Saw, pada putusan tersebut tidak menggambarkan majelis hakim mempertimbangkan hadist yang ada, namun cenderung mengedepankan pendapat dari Ibnu Abbas, ijtihad hakim dan KHI,

padahal dengan begitu majelis hakim melenceng dari dalil qhat'i maka bertentangan dengan syari'at islam.

B. SARAN

Setelah mempelajari, memahami dan menganalisis perkara waris ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Untuk pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang (DPR), hendaknya memperbaharui dan menyempurnakan aturan Kewarisan Islam Indonesia. Agar tercipta kepastian hukum di lingkungan Peradilan.
2. Untuk Pengadilan Agama, hendaknya dapat lebih mensosialisasikan yurisprudensi-yurisprudensi yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum/alasan-alasan yang kuat (strong reason). Agar yurisprudensi ini dapat menjadi salah satu sumber hukum yang dapat diikuti oleh para hakim lain dalam menyelesaikan kasus yang serupa, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum. Serta dapat menjadi sumber pengetahuan dalam bidang waris Islam Indonesia bagi para penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas.
3. Untuk para hakim di Lingkungan Peradilan, hendaknya mengemukakan alasan/argumentasi yang jelas ketika keluar dari ketentuan ketentuan/hukum secara umum dan menghendaki ketentuan lain dalam penyelesaian perkara- perkara yang bersifat kasuistik (kasus-kasus tertentu). Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami putusan tersebut oleh hakim lainnya, akademisi, dan mahasiswa lainnya, serta agar para hakim memutuskan putusan menggunakan sumber yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Hadist karena sumber dari segala hukum islam adalah Al-Qur'an dan Hadist.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Athoillah, M. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Al-Mawaris FisySyari"atil Islamiyah Ala Dhau"Al-Kitab wa Sunnah. Terjemahan A.M. Basalam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Ash-Sharbini al-Khatib, Muhammad. *Mughini al-Muhtar*, Juz III Kairo: Musthafa al-Ba'bil Halby, 1958
- Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984-1985
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Muslim, Shahih. *Kitabul faraidh*, Fikr 41392, 1993
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Juz3 Kairo: Daral-Fath, 1995.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Cet. III, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2002.

- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.
- Kuzari, Ahmad. *Sistem Ashabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1995.
- Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid. 8, h. 206.
- Ahmad Isawi, Muhammad, *Tafsir Ibnu Mas'ud: Studi Tentang Ibnu Mas'ud dan Tafsirnya*, Penerjemah: Ali Murtadho Syahudi, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka , 2008
- Husein Nasution, Amien. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Euis Nurlaelawati, "Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara Kandung", dalam Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Warsuni Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawir*, Terj. Zainul Abidin, dkk, *Al-Munawir Arab-Indonesia*,

B. Peraturan

KHI, Buku II

A Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008

Team Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama*

Putusan 2661/Pdt.G/2018/PA.Smg

C. Internet

<https://www.pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>

D. Wawancara

Wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Dra. Hj.

Mahmudah, M.H. Semarang. 25 Juli 2019

Wawancara pribadi dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang, Prof. Dr. Ahmad Rofiq MA, Semarang.

11 April 2019

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Luluk Dyah Pitaloka Oktaviani
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kendal, 13 Oktober 1997
3. Alamat Rumah : Desa Rejosari Rt 01 Rw 02 Kecamatan
Kangkung
Kabupaten Kendal
4. No. HP : 089692294960
5. E-mail : lulukdyah84@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Rejosari Tahun 2003
 - b. SDN 01 Rejosari Tahun 2009
 - c. SMP N 1 Cepiring Tahun 2012
 - d. MA N Kendal Tahun 2015
 - e. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. TPQ Karangayu 2005
 - b. Madrasah Diniyyah Rejosari 2008
 - c. Islamic Boarding School MAN Kendal 2013
 - d. Mahad Al Jamiah Walisongo Semarang 2016

Semarang, 23 Juli 2019

Luluk Dyah Pitaloka O
NIM. 1502016103